

RENCANA KERJA
(R E N J A)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2026



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2026

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan




EWIEK KHAVIDA S.STP, M.M.
NIP. 19730501 199603 2 004

Verifikator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



RIMA ADHI HAPSARI S.Sos.
NIP. 19971019 202202 2 002

Mengetahui,
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 1992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 disusun untuk menjalankan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPPPAPPKB Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk dilakukan review.

Akhirnya kami berharap semoga Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pencapaian visi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DPPPAPPKB



DRA. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M

NIP. 19700730 199001 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... 1

HALAMAN VERIFIKASI 2

KATA PENGANTAR..... 3

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL..... 5

BAB I PENDAHULUAN 6

 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan..... 6

 1.2. Landasan hukum 11

 1.3. Maksud dan Tujuan 13

 1.3. Sistematika Penulisan 14

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB 15

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 dan capaian
 Renstra Tahun 2024 -2026 15

 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB..... 50

 2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) DPPPAPPKB 50

 2.2.2 Data pokok 59

 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB 109

 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD 111

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 127

 2.6 Inovasi Perangkat Daerah 127

 2.7 Penghargaan 128

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 129

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 129

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAPPKB 129

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 133

 4.1 Program dan Kegiatan..... 133

BAB V PENUTUP 154

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB s/d Tahun 2023.....	16
Tabel	2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB s/d Triwulan I Tahun 2024	32
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPPAPPKB Triwulan I Tahun 2024.....	51
Tabel	2.4	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.....	60
Tabel	2.5	PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD.....	61
Tabel	2.6	Persentase keterwakilan dilembaga pemerintah	69
Tabel	2.7	Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	70
Tabel	2.8	Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD.....	72
Tabel	2.9	Pervalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	73
Tabel	2.10	Kasus Kekerasan terhadap anak dan Perempuan.....	75
Tabel	2.11	Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	76
Tabel	2.12	Persentase Desa sayang ibu dan bayi	78
Tabel	2.13	Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi	80
Tabel	2.14	Kabupaten Layak Anak Kabupaten Temanggung	82
Tabel	2.15	Persentase anak korban kekerasan kabupaten Temanggung.....	83
Tabel	2.16	Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung	85
Tabel	2.17	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan....	86
Tabel	2.18	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	88
Tabel	2.19	PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (unmet need).....	89
Tabel	2.20	PUS < 20 TH	91
Tabel	2.21	PUS Dibawah 20 Tahun Kabupaten Temanggung	91
Tabel	2.22	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th.....	93
Tabel	2.23	ASFR 15 – 19 TH Kabupaten Temanggung	94
Tabel	2.24	Persentase PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern	95
Tabel	2.25	PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern.....	95
Tabel	2.26	Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung	96
Tabel	2.27	Persentase kepesertaan KB aktif/Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun.....	97
Tabel	2.28	Persentase PUS MKJP Kabupaten Temanggung.....	98
Tabel	2.29	Jumlah Pus yang menggunakan alokon MKJP.....	100
Tabel	2.30	Presentase Kampung KB	104
Tabel	2.31	Data Kampung KB	105
Tabel	2.32	Indek Pembangunan Keluarga Temanggung.....	109
Tabel	2.33	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025.....	112
Tabel	2.34	Usulan program dan kegiatan masyarakat	127
Tabel	2.35	Daftar Inovasi Perangkat Daerah	127
Tabel	2.36	Daftar Penghargaan	138
Tabel	3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja	130
Tabel	4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan	134
Tabel	4.2	Rencana Program dan Kegiatan	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

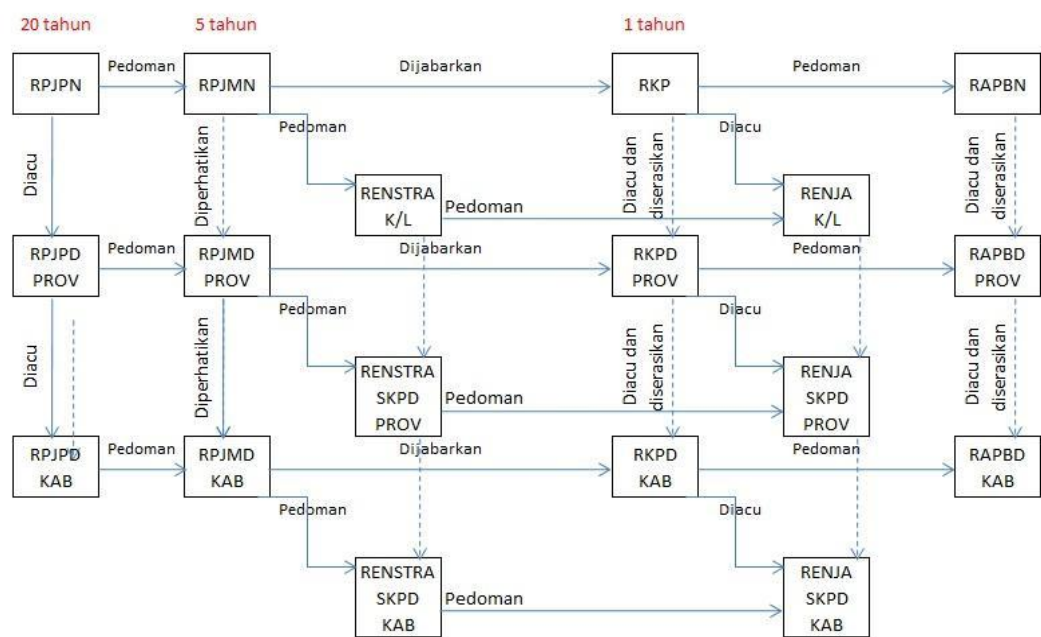
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja DPPPAPPKB juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja DPPPAPPKB disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di DPPPAPPKB berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab DPPPAPPKB.

Rencana Kerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan DPPPAPPKB Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung, serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu di Tahun 2026.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPPAPPKB, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPPAPPKB yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan serta kondisi pelayanan di DPPPAPPKB;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025;
- 3) Data Pokok Pembangunan pada DPPPAPPKB;
- 4) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan;
- 5) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; serta
- 6) Informasi lain terkait pelayanan pada DPPPAPPKB.

b. Analisis Gambaran Pelayanan DPPPAPPKB

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPPAPPKB adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPPPAPPKB untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPPAPPKB

c. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun Lalu Berdasarkan Renstra DPPPAPPKB

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPPPAPPKB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPPPAPPKB tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra DPPPAPPKB);
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra DPPPAPPKB);
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra DPPPAPPKBsampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan DPPPAPPKB tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPPPAPPKB. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPPAPPKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPPPAPPKB
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi (DPPPAPPKB
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPPAPPKB);
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPPPAPPKB

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- g. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- h. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- i. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPPAPPKB).

g. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPAPPKB

h. Perumusan Kegiatan Prioritas dan Strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja DPPAPPKB

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPAPPKB merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPAPPKB

Penyempurnaan rancangan Renja DPPAPPKB perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja (Perangkat

DPPPAPPKB dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja DPPPAPPKB Dengan Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPPAPPKB untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja DPPPAPPKB Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP DPPPAPPKB Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPPPAPPKB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2024-2026

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025, diperlukan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ke-satu pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB
s.d Tahun 2024

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target akhir Renstra 2026		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp	K	Rp. (Renja)	Rp. (DPA)	IV					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	K	Rp	9	10	11	18	19	20	21	22	23
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								406						
208.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.234.486.573	4.489.938.912		966.012.902		4.238.566.860		94,40
20801202	Administrasi Keuangan					14	3.215.218.573	3.499.540.912		725.190.983	14,00	3.411.795.317	100,00	97,49
2080120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan			29 orang /14 bulan	3.215.218.573	3.499.540.912	3,00	725.190.983	14	3.411.795.317	100,00	97,49
20801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah						85.000.000	79.580.000		20.166.850		60.040.150		75,45
2.08.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			8	3.000.000	3.000.000	3	2.100.000	8	2.901.000	100,00	96,70
2.08.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket			11	11.000.000	15.580.000	3	7.853.000	10	13.795.000	90,91	88,54
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			12	8.000.000	8.000.000	3	2.821.350	12	7.786.150	100,00	97,33

2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			12	13.000.000	13.000.000	3	6.097.500	12	11.586.000	100,00	89,12
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			12	50.000.000	40.000.000	3	1.295.000	12	23.972.000	100,00	59,93
20801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12	843.368.000	791.189.000		177.222.069	9	657.704.393	75,00	83,13
2080120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan			12	8.000.000	8.000.000	3	1.897.000	12	7.725.500	100,00	96,57
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	35.000.000	37.400.000	3,000	10.189.499,00 0	12	31.400.467	100,00	83,96
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan			12	7.000.000	7.000.000	3,000	4.020.000,000 0	12	6.536.000	100,00	93,37
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12	793.368.000	738.789.000	3	161.115.570	12	612.042.426	100,00	82,84
20801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.900.000	119.629.000		43.433.000		109.027.000		
2080120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			2	15.000.000	18.000.000	2	4.850.000	2	15.415.000	100,00	85,64

2.08.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			49	40.900.000	47.006.000	21	20.613.000	49	45.158.000	100,00	96,07
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			2	25.000.000	30.000.000	2	4.970.000	2,00	27.513.000	100,00	91,71
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			2	10.000.000	24.623.000	2	13.000.000	2,00	20.941.000	100,00	85,05
Rata Rata Capaian Kinerja													99,30	
Predikat													sangat tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						155.000.000	250.000.000		72.673.050		122.660.300		49,06
20802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						55.000.000	35.000.000		17.971.500		23.681.500		118
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%			2,65			2,27		2,27		85,53	
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%			100					100		100	

20802201	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000	10.000.000	46	3.880.500	46	3.880.500	100,00	38,81
2080220103	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah			46	30.000.000	10.000.000	46	3.880.500	46	3.880.500	100,00	38,81
20802203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000	25.000.000	40	14.091.000	40	19.801.000	100	79
2080220302	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang			40	25.000.000	25.000.000	40	14.091.000	40	19.801.000	100,00	79,20
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													Sangat Tinggi	
20803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						30.000.000	75.000.000	3	16.750.250	12	21.003.750	100	6

		Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%			0,0029			0,0055		0,0055		9,59	
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	%			0,0029			0,003		0,0030		97,91	
20803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					12	30.000.000	75.000.000	3	16.750.250	12	21.003.750	100,00	5,67
2080320202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	dokumen			12	30.000.000	75.000.000	3	16.750.250	12	21.003.750	100,00	28,01
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													sangat tinggi	
20804	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						45.000.000	35.000.000	5	16.169.750	47	29.800.750	200	166
		Persentase desa sayang ibu dan bayi	%			62,28			100		100		100,00	
		Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%			100			57		56,67		56,67	
20804201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000	10.000.000	5	6.877.750	7	7.757.750	100	78

2080420102	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen			7	20.000.000	10.000.000	5,0000	6.877.750	7	7.757.750	100,00	77,58
20804202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000	25.000.000		9.292.000	40	22.043.000	100	88,17
2080420202	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang			40	25.000.000	25.000.000		9.292.000	40	22.043.000	100,00	88,17
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													sangat tinggi	
20806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						25.000.000	10.000.000		3.400.000		9.114.000		57
		Kabupaten Layak Anak	kategori			nindya	madya		nindya		nindya		madya	100,00
20806202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000	10.000.000		3.400.000	0	5.714.000	-	57

2080620201	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak KewenanganKabupaten/Kota	anak			25	25.000.000	10.000.000	25	3.400.000	25	9.114.000	100,00	91,14
Rata Rata Capaian Kinerja													100	
Predikat													sangat tinggi	
20807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						0	95.000.000		18.381.550		39.060.300		
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%			0,004			0,0040		0,0040		99,57	
20807201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						0	20.000.000	0		46	18.988.750	100	0
2080720104	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/progrma/kegiatan pencegahan KTA	Orang			46	0	20.000.000	0		46	18.988.750	100,00	94,94
20807202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							75.000.000	3	18.381.550	12	20.071.550	100	26,76
2080720205	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	anak			12		75.000.000	3	18.381.550	12	20.071.550	100,00	26,76
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													sangat tinggi	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.792.817.000	11.998.410.000		4.331.100.953		10.569.754.426		88,09
21402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						96.000.000	423.256.000		114.774.060		413.532.152		97,70
		Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%			100			100		100		100	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%			10,05			7,60		7,60		100	
		Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%			2			0,37		0,37		100	
		Angka kelahiran remaja usia 15- 19 th (ASFR 15- 19th)	%			14,1			9,13		9,13		100	
21402202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						96.000.000	423.256.000		114.774.060		413.532.152		
2140220212	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan			12	-	217.800.000	3	57.850.000	12	217.350.000	100,00	99,79
2140220213	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen			12	96.000.000	205.456.000	3	56.924.060	12	196.182.152	100,00	95,49
Rata Rata Capaian Kinerja													100,00	
Predikat													sangat tinggi	

21403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						6.425.917.000	7.301.754.000		2.548.429.993		6.000.055.574		82,17
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%			88,50			90,36		90,36		100	
		Persentase kepesertaan KB aktif	%			75,75			81,85		81,85		100	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%			46,1			46,45		46,42		100	
		Persentase kampung Keluarga berkualitas	%			23,53			28,45		28,45		75,11	
21403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						1.275.400.000	1.790.619.000		436.127.696		1.389.979.188		
2140320108	Pengendalian Program KKBPK		laporan			4	80.000.000	80.000.000		29.776.500	2	53.546.500	50,00	66,93
2140320110	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan			12	770.400.000	1.055.144.000		250.893.621	9	932.969.463	75,00	88,42

2140320111	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan			12	260.000.000	300.000.000		80.917.450	9	186.502.300	75,00	62,17
2140320112	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen			12	0	71.825.000		43.312.375	9	66.565.325	75,00	92,68
2140320113	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen			12	10.000.000	83.650.000		6.073.750	9	56.678.750	75,00	67,76

2140320114	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi			15	155.000.000	200.000.000		25.154.000	7	93.716.850	46,67	46,86
21403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						578.000.000	2.228.001.000	0	1.466.662.650	1.935	2.186.934.600	100,10	98,16
2140320204	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	kader			1933	578.000.000	821.525.000		469.455.000	1.933	817.445.000	100,00	99,50
2140320206	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan			7	0	1.406.476.000		997.207.650	2	1.369.489.600	28,57	97,37

21403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						3.556.017.000	2.503.784.000		403.814.097	0	1.843.118.736		
2140320301	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan			12	27.900.000	30.000.000		9.429.500	9	29.260.000	75,00	97,53
2140320303	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang			6120	1.994.982.000	2.075.434.000		378.118.097	5.069	1.436.576.736	82,83	69,22
2140320306	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit			11	1.516.035.000	363.350.000		80.000,00	11	347.199.250	100,00	95,56
2140320308	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan			12	17.100.000	35.000.000		16.186.500,00	9	30.082.750	75,00	85,95
21403204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat						1.016.500.000	779.350.000		241.825.550		580.023.050		74,42

	Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2140320402	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen			6	9.000.000	5.314.000		4.568.500	0	4.568.500	0,00	85,97
2140320406	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung			67	1.007.500.000	774.036.000		237.257.050	50	575.454.550	74,63	74,34
Rata Rata Capaian Kinerja													66,62	
Predikat													sangat sedang	
21404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						4.270.900.000	4.273.400.000		1.667.896.900		4.156.166.700		
		Indek Pembangunan Keluarga	%			55,98								
21404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						4.230.900.000	4.173.400.000		1.599.657.400		4.071.224.700		
2140420116	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		laporan			12	0	19.200.000	3	7.157.900	5	7.657.900	41,67	39,88

2140420117	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan			6	15.000.000	17.500.000	2	7.410.250	5	15.931.750	83,33	91,04
2140420118	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	unit			25	360.000.000	300.000.000	25	282.446.000	25	286.296.000	100,00	95,43
2140420124	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kader			1.827	3.855.900.000	3.836.700.000		1.302.643.250	1.827	3.761.339.050	100,00	98,04
21404202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan						40.000.000	100.000.000		68.239.500		84.942.000		

	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
2140420202	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	organisas i			20	40.000.000	100.000.000		68.239.500,00	20	84.942.000	100,00	84,94
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	85,00	
							15.182.303. 573	16.738.348.9 12		5.369.786.90 5		Predikat	tinggi	
JUMLAH												14.930.981.5 86		
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		83,44	
	PREDIKAT												tinggi	
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		91,98	
	PREDIKAT												sangat tinggi	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB
s.d Triwulan II Tahun 2025

No	Bidang/ Progra/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2026		Realisai S/D 2024		Target 2025			Realisasi Per Triwulan Th. 2025				Realisasi 2025		Capaian 2025		Realisasi S/D 2025		Capaian S/D 2025	
											I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	24 (7+20)	25 (8+21)	26 (24/5*100)	27 (25/6*100)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.003.066.815		5.065.338.403		4.576.461.471	4.710.946.649		1.114.140.995		1.312.720.515		2.426.861.510				7.490.804.713		62,41
1	Administrasi Keuangan			1260	9.701.326.815	406	4.238.566.860	392	3.615.772.671	3.772.982.849	112	876.674.310	108	1.175.654.581	220	2.052.328.891	56	54,40	626	6.290.895.751	49,68	64,85
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	1260	9.701.326.815	406	4.238.566.860	392	3.615.772.671	3.772.982.849	112	876.674.310	108	1.175.654.581	220	2.052.328.891	392	54,40	626	6.290.895.751	49,68	64,85
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36	197.000.000	12	60.040.150	12	62.000.000	39.275.000	3	3.585.497	3	3.465.700	6	5.655.997	50	14,40	18	65.696.147	50,00	33,35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	36	6.000.000	12	2.901.000	12	2.000.000	1.400.000	3	225.000	0	0	6	225.000	50,00	16,07	18	3.126.000	50,00	52,10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	36	34.000.000	12	13.795.000	12	11.000.000	6.815.000	3	0	3	0	6	0	50,00	0,00	18	13.795.000	50,00	40,57
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	36	19.000.000	12	7.786.150	12	7.000.000	4.200.000	3	900.200	3	739.200	6	900.200	50,00	21,43	18	8.686.350	50,00	45,72
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	36	46.000.000	12	11.586.000	12	12.000.000	11.860.000	3	298.000	3	656.000	6	298.000	50,00	2,51	18	11.884.000	50,00	25,83

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	36	92.000.000	12	23.972.000	12	30.000.000	15.000.000	3	2.162.297	3	2.070.500	6	4.232.797	50,00	28,22	18	28.204.797	50,00	30,66
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	1.855.040.000	12	657.704.393	12	822.788.800	822.788.800	3	227.330.188	3	128.014.734	6	355.344.922	50	43,19	18	1.013.049.315	50,00	54,61
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	36	28.000.000	12	7.725.500	12	7.000.000	7.000.000	3	564.000	3	118.000	6	682.000	50,00	9,74	18	8.407.500	50,00	30,03
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	121.800.000	12	31.400.467	12	32.500.000	32.500.000	3	6.516.736	3	6.826.875	6	13.343.611	50,00	41,06	18	44.744.078	50,00	36,74
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	36	21.000.000	12	6.536.000	12	6.000.000	6.000.000	3	920.000	3	1.250.000	6	2.170.000	50,00	36,17	18	8.706.000	50,00	41,46
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	1.684.240.000	12	612.042.426	12	777.288.800	777.288.800	3	219.329.452	3	119.819.859	6	339.149.311	50,00	43,63	18	951.191.737	50,00	56,48
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			198	249.700.000	55	109.027.000	55	75.900.000	75.900.000	4	6.551.000	15	5.585.500	19	12.136.500	35	15,99	74	121.163.500	37,37	48,52
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	46.000.000	2	15.415.000	2	15.000.000	15.000.000	2	2.700.000	0	1.740.000	2	4.440.000	100	29,60	4	19.855.000	66,67	43,16

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	180	124.000.000	49	45.158.000	49	35.900.000	35.900.000	2	3.851.000	15	3.845.500	17	7.696.500	34,69	21,44	66	52.854.500	36,67	42,62
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	79.700.000	2	27.513.000	2	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	27.513.000	33,33	34,52
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	0	2	20.941.000	2	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	20.941.000	33,33	0,00
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program												69,76		61,57		47,83	0	
																Sedang		Rendah		Sangat Rendah		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				180.901.500		23.681.500		35.000.000	35.000.000		295.000		300.000		595.000				24.276.500		
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,67		2,65		2,66		2,74		2,74		2,74		100		2,74		100		

		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	100			46			46,00		46		46		100		46,00		100		
5	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			138	90.451.500	46	3.880.500	46	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	46	3.880.500	33,33	4,29	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	138	90.451.500	46	3.880.500	46	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	46	3.880.500	33,33	4,29	
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			120	90.450.000	40	19.801.000	40,00	25.000.000	25.000.000	40,00	295.000	-	300.000	40,00	595.000	100,00	2,38	80	20.396.000	66,67	22,55
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	120	90.450.000	40	19.801.000	40	25.000.000	25.000.000	40	295.000	0	300.000	40	595.000	100	2,38	80	20.396.000	66,67	22,55
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program												50,00		63,00		50,00	0	
																Sangat Rendah	Rendah		Sangat Rendah			

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					90.601.500		21.003.750		42.842.200	38.394.370		0		825.000		825.000				21.828.750		
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,0027		0,0029	0,0055	0,0028			0,0037		0,0055		0,0055		2,60					
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	%	0,0027		0,0029	0,0030	0,0028			0,0010		0,0022		0,0022		100					
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			15	90.601.500	5	21.003.750	5	42.842.200	38.394.370	0	0	1	825.000	1,00	825.000	0,00	2,15	6	21.828.750	40,00	24,09
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	15	90.601.500	5	21.003.750	5	42.842.200	38.394.370	0	0	1	825.000	1	825.000	20,00	2,15	6	21.828.750	40,00	24,09
															Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program	20,00		6,00		40,00		
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					90.451.500		21.003.750		25.000.000	18.959.200		95.000		0		95.000				21.098.750		
		Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	62,98		62,28		62,63			100		100		100		100,00		63,28		100	
		Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	100		100		100			56,67		56,67		56,67		56,67		100		56,67	

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				120	90.451.500	40	21.003.750	40	25.000.000	18.959.200	40	95.000	0	0	40,00	95.000	100,00	0,50	80	21.098.750	66,67	23,33
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	120	90.451.500	40	21.003.750	40	25.000.000	18.959.200	40	95.000	0	-	40	95.000	100	0,50	80,00	21.098.750	66,67	23,33	
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program												100,00		80,00		66,67		
																Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				90.451.500		9.114.000		25.000.000	40.335.500		-		-		-				9.114.000			
	Kabupaten Layak Anak	kategori	nindya		nindya	nindya			nindya		nindya		nindya		nindya	nindya		nindya		100,00		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				90	90.451.500	30	9.114.000	30	25.000.000	40.335.500	30	0	0	0	30,00	0	100,00	0,00	60	9.114.000	66,67	10,08
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	90	90.451.500	30	9.114.000	30	25.000.000	40.335.500	30	0	0	0	30	0	100	0,00	60,00	9.114.000	66,67	10,08	
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program												100,00		60,00		66,67		

																Sangat Tinggi		Rendah		Sedang		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				115.525.875		39.060.300		35.000.000	30.569.400		1.014.000		-		1.014.000				40.074.300		
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0038		0,004	0,004	0,0039			0,0018		0,0045		0,0045		0,0018		85,53		85,53	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			46	10.000.000	46	18.988.750	46	10.000.000	8.494.600	2	0	0	0	2,00	0	4,35	0,00	48	18.988.750	104,35	189,89
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	46	10.000.000	46	18.988.750	46	10.000.000	8.494.600	2	0			2	0	4	0,00	48,00	18.988.750	104,35	189,89
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			36	105.525.875	12	20.071.550	12	25.000.000	22.074.800	4	1.014.000	0	0	4,00	1.014.000	33,33	4,59	16	21.085.550	44,44	19,98
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	anak	36	105.525.875	12	20.071.550	12	25.000.000	22.074.800	4	1.014.000	0	0	4	1.014.000	33	4,59	16,00	21.085.550	44,44	19,98
					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program												18,84		32,00		74,40	
																	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sedang	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				815.600.240		413.532.152		96.000.000	493.800.000		24.132.723		3.500.000		27.632.723				441.164.875		
		Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100		100	100				10 0		10 0		100		100		100	100	100	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	10		10,5	7,60	10,3			7,43		7,4 2		7,42		10,30		7	100	100	
		Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	1,75		2,00	0,37	1,85			0,32		0,3 3		0,33		1,85		0	100	100	
		Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	12,4		12,6	9	12,5			0,91		8,7 5		8,75		12,50		9	100	100	100
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			36	815.600.240	12	413.532.152	12	96.000.000	493.800.000	3	24.132.723	3	3.500.000	6	27.632.723	25	5,60	18,00	441.164.875	50	54,09
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	36	198.200.000	12	0	12	0	60.000.000	3	4.950.000	3	3.500.000	6	8.450.000	25	14,08	18,00	8.450.000	50	4,26
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	36	617.400.000	12	217.350.000	12	-	217.800.000	3		3		6	0	50	0,00	18,00	217.350.000	50	35,20
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokume n	36	240	12	196.182.152	12	96.000.000	216.000.000	3	19.182.723	3		6	19.182.723	50	8,88	18,00	215.364.875	50	89.735.36 4,58

					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program											41,67		18,00		50,00		
															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					15.224.479.385		5.755.944.886		5.193.232.000	7.474.989.000		484.945.640		616.027.392		1.100.973.032				6.856.917.918		
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	88,7		88,5		88,60		90,20		90,40		90,40		100		100,00		100,00		
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	75,85		75,75		76,80		82,00		82,22		82,22		100		100,00		100		
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,2		46,1		46,2		46,45		47,36		46,45		100		100		100		
		Persentase kampung Keluarga berkualitas	%	53,03		38,88		45,45		36,40		105,36		105,36		100,00		100		100,00	#DIV/0!	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				3.975.683.385		1.510.619.000		1.195.400.000	1.924.160.000		166.088.704		133.465.088	0	299.553.792	15,57	0,00	1.810.172.792		45,53	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	36	2.311.200.000	12	1.055.144.000	12	770.400.000	1.139.160.000	3	166.088.704	3	111.522.088	6	277.610.792	25	24,37	18,00	1.332.754.792	50	57,67

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	36	780.000.000	12	300.000.000	12	260.000.000	400.000.000	3	0	3	20.850.000	6	20.850.000	25	5,21	18,00	320.850.000	50	41,13
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen	12	483.112.985	12	71.825.000	12	0	125.000.000	3	0	3	0	6	0	25	0,00	18,00	71.825.000	150	14,87
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen	12	250.000.000	12	83.650.000	12	10.000.000	10.000.000	3	0	3	1.093.000	6	1.093.000	50,00	10,93	18,00	84.743.000	150,00	33,90
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	45	151.370.400	15		15	155.000.000	250.000.000	15	0		0	15	0	100	0,00	30,00	0	67	0,00

	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		5.806	2.097.350.000	1.940	2.186.934.600	1.937	941.350.000	2.874.672.000	1.933	8.300.000	-	223.100.000	1933	231.400.000	100	8,05	3.873,00	2.418.334.600	67	115,30	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	kader	5799	1.734.000.000	1.933	817.445.000	1933	578.000.000	2.176.840.000	1933	8.300.000		223.100.000	1933	231.400.000	100	10,63	3.866,00	1.048.845.000	67	60,49
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan	7	363.350.000	7	1.369.489.600	4	363.350.000	697.832.000	0	0	0	0	0	0	0,00	7,00	1.369.489.600	100	376,91	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			18.432	6.119.946.000	-	1.482.936.736	6.144	2.039.982.000	2.126.757.000	582	310.556.936	3.156	259.462.304	3.738	570.019.240	9	27	3.738	2.052.955.976	20	34
	Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	36	83.700.000		29.260.000	12	27.900.000	33.300.000	3	790.000	3	8.075.000	6	8.865.000	25	26,62	6,00	38.125.000	17	45,55
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	orang	18360	5.984.946.000		1.436.576.736	6120	1.994.982.000	2.063.307.000	576	309.001.936	3150	251.387.304	3726	560.389.240	9	27,16	3.726,00	1.996.965.976	20	33,37

	Panjang (MKJP)	Jangka Panjang (MKJP)																				
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	36	51.300.000		17.100.000	12	17.100.000	30.150.000	3	765.000	3		6	765.000	25	2,54	6,00	17.865.000	17	34,82
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			272	3.031.500.000	68	575.454.550	68	1.016.500.000	549.400.000	68	-	68	-	136	-	100	-	204	575.454.550	75	19
	Fasilitasipengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	dokumen	68	9.000.000	0	0	68	9.000.000	275.000.000	68	0	68	0	68	0	100	0,00	68,00	0	100	0,00
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung	204	3.022.500.000	68	575.454.550	68	1.007.500.000	274.400.000	68	0	68	-	68	0	100	0,00	68,00	575.454.550	33	19,04
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program	48,70		654,08		68,36	
																	Sangat Rendah				Sedang	

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				5.290.100.000 4.182.981.050 4.258.600.000 4.249.053.450 274.939.500 318.405.300 593.344.800																4.776.325.850			
		Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga)	angka	56		55,98		56			63,17		63		63,17		100		100		100	-	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			154	1.284.200.000	73	336.700.000	64	199.200.000	198.298.000	3	100.000	3	1.200.000	6	1.300.000	5	1	79	338.000.000	51	26	
	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	90	150.000.000	30	0	30	15.000.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	30,00	0	33	0,00		
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan	12	19.200.000	12	19.200.000	12	19.200.000	28.800.000	3	100.000	3	1.200.000	6	1.300.000	25	4,51	18,00	20.500.000	150	106,77	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	12	35.000.000	6	17.500.000	12	35.000.000	25.998.000	0	0		0	0	0	0,00	6,00	17.500.000	50	50		

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit	40	1.080.000.000	25	300.000.000	10	130.000.000	130.000.000	0	0			0	0	0	0,00	25,00	300.000.000	63	27,78
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1842	4.005.900.000	1840	3.846.281.050	1840	4.059.400.000	4.050.755.450	1828	274.839.500	1.829	317.205.300	3.657	592.044.800	99	15	5.497	4.438.325.850	298	111
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	organisasi	3	150.000.000	1	84.942.000	1	40.000.000	31.355.450	-	0			0	0	0	0,00	1,00	84.942.000	33	56,63

Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	%	1827	1.827.000.000	1827	1.827.000.000	1.827	1.827.000.000	1.827.000.000	1.827	94.239.500	1.827	99.285.300	1827	193.524.800	100	10,59	1.827,00	2.020.524.800	100	110,59
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	%	12	2.028.900.000	12	1.934.339.050	12	2.192.400.000	2.192.400.000	1	180.600.000	2	217.920.000	3	398.520.000	8	18,18	15,00	2.332.859.050	125	114,98
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program											19,05		274,57		79,17		
				Sangat Rendah													Tinggi				
JUMLAH				33.901.178.315	15.531.659.791	####	14.287.135.671	17.092.047.569		1.899.562.858		2.251.778.207		4.151.341.065	51,24	10,74		19.681.605.656			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH															46,80	24,29					
PREDIKAT															Sangat Rendah						

	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	67,74				
	PREDIKAT	sedang				

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 belum sesuai target yang ditetapkan.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB berupa:

- 1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah belum semua memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, Capaian Kinerja : **80,62%**, dengan kategori Tinggi.

Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk Capaian Kinerja: **73,62%**, dengan kategori sedang.

- 2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah belum semua memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Capaian Kinerja: **92,83%**, dengan kategori Tinggi;
 - b. Program Perlindungan Perempuan Capaian Kinerja: **53,75%**, dengan kategori rendah;
 - c. Program peningkatan kualitas keluarga Capaian Kinerja: **78,34%**, dengan kategori tinggi;
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak/PHA) Capaian Kinerja: **100%**, dengan kategori sangat Tinggi;
 - e. Program perlindungan khusus anak Capaian Kinerja: **99,57%**, dengan kategori sangat Tinggi;
 - f. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga Capaian Kinerja: **100%**, dengan kategori sangat Tinggi;

- g. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Capaian Kinerja: **100%**, dengan kategori sangat Tinggi.
3. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Capaian Kinerja : 100 %, dengan kategori sangat Tinggi.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja : 100 %, dengan kategori sangat Tinggi.
 - c. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.
 - d. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.
 - e. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.
 - f. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.

- g. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: 100%, dengan kategori sangat Tinggi.
- h. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Capaian Kinerja: 98,16%, dengan kategori sangat Tinggi.

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) DPPPAPPKB

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPPAPPKB Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2024	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala nilai perangkat daerah				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,71	95,75	95,77	95,85	95,71	96,27		100	V				
2	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,18	2,65	2,66	2,67	8,28	2,78		27,61					V
3	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,42	2,65	2,66	2,67	2,24	2,74		100	V				
4	Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	100	100	100	100	100	100		100	V				
5	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,005	0,0029	0,0028	0,0027	0,0018	0,0055		2,60					V
6	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	%	0,0017	0,0029	0,0028	0,0027	0,001	0,0010		100	V				
7	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	100	62,28	62,63	62,98	100	100		100	V				
8	Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	100	100	100	100	53,33	56,67		56,67				V	
9	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Nindya		100	V				
10	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0035	0,004	0,0039	0,0038	0,0009	0,0018		100	V				
11	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,65	0,63	0,6	0,55	0,69	0,77		71,67			V		
12	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100	100	100	100	100	100		100	V				

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2024	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw II 2025	Skala nilai perangkat daerah				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
13	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	8,6	10,5	10,3	10	8,08	7,42		100	V				
14	Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	1,02	2	1,85	1,75	0,74	0,33		100	V				
15	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	14,1	14,1	13,81	13,5	14,1	8,75		100	V				
16	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	80,14	88,5	88,6	88,7	80,71	90,14		100	V				
17	Persentase kepesertaan KB aktif	%	80,14	75,75	75,8	75,85	80,71	82,22		100	V				
18	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	45,77	46,1	46,15	46,2	45,86	47,36		100	V				
19	Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	%	52,71	37,88	45,45	53,03	52,71	105,26		100	V				
20	Indek Pembangunan Keluarga	%	58,19	55,98	55,99	56	62,08	63,17		100	V				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status sangat tinggi ada 15 terdiri dari:

a. Indek Pembangunan Gender

b. Presentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah

1. Faktor Pendorong :

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan memperluas peluang untuk bekerja di lembaga pemerintah;

2. Faktor Penghambat :

Budaya Patriaki, yang menganggap laki laki lebih layak bekerja;

3. Rencana tindak lanjut :

Mengakses data perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintahan, BKPSDM, BLUD, SETWAN, dan PEMDES.

c. Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD

1. Faktor Pendorong:

Telah dilaksanakannya pelatihan bagi perencana PD dalam menyusun ARG;

2. Faktor Penghambat:

Belum tersusunnya RAD pengarusutamaan gender dan kurangnya pembekalan penyusunan ARG bagi Tim Teknis maupun Tim Focal Point;

3. Rencana tindak lanjut:

Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG.

d. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan

1. Faktor Pendorong :

Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

2. Faktor Penghambat :

Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas.

3. Rencana tindak lanjut :

Penguatan dalam melakukan pendampingan kecamatan ramah anak (kelana) dan desa/kelurahan ramah anak (dekela).

e. Persentase desa sayang ibu dan bayi

1. Faktor pendorong:

Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

2. Faktor penghambat:

Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas fasilitasi.

3. Rencana tindak lanjut:

Penguatan dan advokasi dan sosialisasi tentang GSIB bersama mitra kerja terhadap semua pemangku kepentingan untuk melakukan Penggerakan Sayang Ibu dan Bayi.

f. Kabupaten Layak Anak

1. Faktor pendorong :

Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).

2. Faktor penghambat:

belum adanya forum anak di tingkat kecamatan.

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Organisasi Masyarakat.

g. Persentase kasus kekerasan terhadap anak

1. Faktor pendorong :

Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

2. Faktor penghambat :

Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping

h. Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga

1. Faktor pendorong :

Adanya kegiatan pendataan dan *up dating* data keluarga.

2. Faktor penghambat :

Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT.

3. Rekomendasi tindak lanjut:

Melakukan pendataan mikro keluarga dan perlunya perda tentang pengendalian penduduk dan KB.

i. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {unmetneed}

1. Faktor pendorong:

- Meningkatnya Kegiatan KIE kepada PUS untuk menjadi akseptor KB;
- Meningkatnya Koordinasi kepada Kampung KB dalam pelayanan KB.

2. Faktor penghambat:

Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT.

3. Rekomendasi tindak lanjut:

Melakukan pendataan mikro keluarga dan perlunya perda tentang pengendalian penduduk dan KB.

j. Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

1. Faktor pendorong :

- terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja;
- meningkatkan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral;
- pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga.

2. Faktor penghambat :

Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja Masih aturan pemerintah yang berbeda antar OPD

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Melakukan promisi, KIE melalui media cetak, Elektronik

k. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)

1. Faktor pendorong :

- Pengembangan life skill bagi remaja;
- Tingkat pendidikan wajar 12 tahun.

2. Faktor penghambat :

Belum adanya laporan baku kelahiran oleh remja usia 15 sampai 19 tahun.

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Up dating data sebagai perhitungan ASFR.

1. Persentase kepesertaan KB aktif

1. Faktor pendorong :

- Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB;
- Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stake holder;
- Mobilisasi media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi.

2. Faktor penghambat :

- Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern
- PUS muda yang menikah di usia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokasi. Adanya kebijakan yang berbeda antar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan target .

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Inovasi pelaporan, pencatatan dan pemantauan dengan aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana), Sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelayanan KB.

m. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

1. Faktor pendorong :

- Tingginya Animo Masyarakat dalam penggunaan alat Kontrasepsi Implan;
- Meningkatnya KIE kepada PUS untuk Ber-KB oleh tenaga lini lapangan dari tingkat Kecamatan oleh PKB ,desa, RW dan RT.

2. Faktor penghambat :

- Masih tingginya rumor kegagalan IUD di masyarakat;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi Pria/MOP.

3. Rekomendasi tindak lanjut:

Meningkatkan KIE tentang Kontrasepsi bagi PUS Muda oleh tenaga lini lapangan di tingkat RW/RT.

n. Indeks Pembangunan Keluarga

1. Faktor pendorong :

meningkatnya faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan dalam keluarga.

2. Faktor penghambat :

lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga.

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya pemahaman tentang perhitungan IPK, karena perhitungan bukan wewenang PD.

2. Capaian indikator dengan status sedang ada 1 Indikator yaitu :

Laju Pertumbuhan Penduduk

1. Faktor pendorong: meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang pengendalian penduduk;
2. Faktor penghambat: masih tingginya angka kelahiran (CBR).
3. Rekomendasi tindak lanjut: meningkatkan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK baik oleh pemerintah maupun swasta dengan melakukan advokasi dan bintek kepada kades/lurah dalam program KKBPK.

3. Capaian indikator dengan status rendah ada 1 Indikator yaitu :

Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender

1. Faktor Pendorong :
Telah dilaksanakannya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender dalam proses perencanaan.
2. Faktor Penghambat :
Belum semua proses perencanaan kegiatan yang berbasis anggaran menggunakan analisa GAP dan GBS
3. Rencana Tindak lanjut :
Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG

4. Capaian indikator dengan status sedang ada 1 indikator yaitu :

Persentase kampung KB berkembang dan Mandiri

1. Faktor pendorong :
Potensi kader dalam mendukung Program mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah.
2. Faktor penghambat :
Belum adanya Perbup tentang kampung KB
3. Rekomendasi tindak lanjut :
Peningkatan advokasi dan KIE dengan melibatkan Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat melakukan jejaring dalam pelaksanaan program kampung KB.

5. Capaian indikator dengan status rendah ada 1 yaitu :

Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas

1. Faktor pendorong :

Adanya komitmen manajemen Puskesmas dan Rumah Sakit untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan hak anak, pendekatan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga psikososial

2. Faktor penghambat :

Tidak adanya kebijakan yang jelas dari manajemen Rumah Sakit/Puskesmas untuk menerapkan standar ramah anak dan regulasi yang mendorong Rumah Sakit/Puskesmas untuk memenuhi kriteria ramah anak.

3. Rekomendasi tindak lanjut :

Perlunya regulasi tentang Rumah Sakit dan Puskesmas ramah anak

6. Capaian indikator dengan status sangat rendah ada 2 yaitu :

a. Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender

1. Faktor pendorong :

- Telah dilaksanakannya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender dalam proses perencanaan;
- Telah disyaratkan sebagai dokumen yang harus direview oleh Inspektorat dalam Penyusunan RKA

2. Faktor Penghambat :

Banyak perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran.

3. Rencana tindak lanjut :

Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG dan sosialisasi dan bmtk kembali bagi perencana dalam penyusunan ARG.

b. Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan

1. Faktor pendorong :

Semakin meningkatnya pemahaman orang tua dan anak tentang perlindungan anak perempuan;

2. Faktor Penghambat :

Kurangnya pemahaman masyarakat atas hak anak dan perlindungan anak.

3. Rencana tindak lanjut :

Sosialisasi pelaporan kasus dengan aplikasi *SIPESAN PERAK* dan *WAGE*.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada DPPPAPPKB terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu data pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta data pokok bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

a. Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Peningkatan pemberdayaan perempuan upaya yang dilakukan untuk memperkuat posisi kapasitas dan peran perempuan agar dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat secara setara dalam berbagai aspek kehidupan baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, maupun hukum.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa isu dan perspektif gender menjadi bagian integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Untuk memperoleh angka Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari persentase jumlah anggaran responsif gender pada belanja operasional dan modal APBD dibandingkan dengan jumlah anggaran operasional dan modal APBD secara keseluruhan, dikalikan 100.

Tabel 2.4
 Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan
 pengarusutamaan gender
 Kabupaten Temanggung,
 Tahun 2020 SD 2025 triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD	N.A	N.A	N.A	232.540.315.305	29.496.530.560	46.691.185.312
2	Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	N.A	N.A	N.A	5.312.431.154.870	358.678.943.856	1.679.089.694.258
3	Persentase					8,22	2,78

Sumber data: DPPPAPPKB Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran responsif gender di semua Perangkat Daerah dibandingkan dengan jumlah belanja operasional dan belanja modal anggaran APBD secara keseluruhan, sesuai dengan tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5

PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2025 Triwulan II

NO	OPD	ARG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	INSPEKTORAT	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	9.055.000.000,00
2	DINAS SOSIAL	6	Penanganan Warga Megara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Pidana Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000,00
			Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilita Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilita Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	45.000.000,00
			Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilita Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	566.611.362,00
			Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		3.452.183.000,00
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	1.126.000.000,00

3	DINPERMADES	1	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.000.000,00
4	DINKOPDAG	3	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000,00
			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		10.000.000,00
			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		400.000.000,00
5	DINDIKPORA	2	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Peningkatan Ketrampilan SKB		100.000.000,00
6	BPKPAD	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	83.300.000,00
7	BPBD	1	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	45.000.000,00
8	DPMPTSP	1	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	180.000.000,00
9	BANKESBANGPOL	1	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi		415.000.000,00

				Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
10	BAPPEDA	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000,00
			Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	20.000.000,00
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	397.472.000,00
11	SETDA	1	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	63.743.000,00
12	DPUPR	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.000.000,00
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Operasi dan Pemeliharaan sistem penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00
13	DPRKPLH	1	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000,00

14	DKPPP	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	235.000.000,00
15	SEKRETARIAT DPRD	1	Layanan dan Administrasi Keuangan	Pendalaman Tugas DPRD		2.827.544.500,00
16	RSU		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota		3.000.000,00
17	DINDUKCAPIL	1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		693.500.000,00
18	BKPSDM	1	KEPEGAWAIAN	Pengembangan Kompetensi ASN		25.000.000,00
19	DPPPAPPKB	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.075.434.000,00
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.000.000,00
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	25.000.000,00
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/kota	25.000.000,00
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	42.842.200,00

				Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangna kab/kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	
			Program Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kab/kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kab/kota	45.000.000,00
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	10.000.000,00
			Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	25.000.000,00
20	DINKES	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	10.000.000,00
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	6.452.500.000,00
21	DINPERINAKER	1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		
22	DINBUDPAR	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	16.100.000,00

23	DINPUSIP	1	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	9.995.000,00
24	SATPOL PP DAMKAR	1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kab/Kota	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	75.000.000,00
25	DINHUB	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kab/Kota		100.000.000,00
26	DINKOMINFO	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kab/Kota		0
27	KECAMATAN TLOGOMULYO	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		23.023.000,00
28	KECAMATAN TEMBARAK	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		10.400.000,00
29	KECAMATAN PARAKAN	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		65.000.000,00
30	KECAMATAN NGADIREJO	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		8.200.000,00
31	KECAMATAN KRANGGAN	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		19.035.000,00

32	KECAMATAN KLEDUNG	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		20.835.000,00
33	KECAMATAN KANDANGAN	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		8.641.000,00
34	KECAMATAN JUMO	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.120.000,00
35	KECAMATAN TRETEP	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		50.000,00
36	KECAMATAN SELOPAMPANG	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		9.195.000,00
37	KECAMATAN BULU	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		28.686.000,00
38	KECAMATAN BEJEN	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		24.965.000,00
39	KECAMATAN PRINGSURAT	1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		9.865.000,00
40	KECAMATAN WONOBOYO	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.800.000,00
41	KECAMATAN BANSARI	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.000.000,00
42	KECAMATAN KEDU	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		24.279.500,00
43	KECAMATAN CANDIROTO	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.280.000,00

44	KECAMATAN GEMAWANG	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.800.000,00
45	KECAMATAN KALORAN	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		38.251.000,00
46	KECAMATAN TEMANGGUNG	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		20.000.000,00
JUMLAH						46.691.185.312

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasar tabel dari anggaran APBD Tahun 2024 anggaran yang responsif gender dari 46 OPD sejumlah Rp 29.502.650.562 dari total semua anggaran APBD sejumlah Rp 1679.089.694.257 atau 2,78%, Penyusunan anggaran responsif gender, dalam penerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor Pendorongnya adalah
 - Telah dilaksankanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Resposif Gender dalam proses perencanaan;
 - Telah disyaratkan sebagai dokumen yang harus direview oleh Inspektorat dalam Pnyusunan RKA.
2. Faktor Penghambatnya adalah
 - Perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran;
 - Implemantasi ARG sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah, karena tanpa dukungan ini maka ARG hanya menjadi formalitas;
 - Beberapa Pihak menganggap ARG hanya sebagai beban adminstarsi tambahan, bukan bagian penting dari perencanaan yang berkualitas;
 - ARG belum mnjadi bagian yang menyatu dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan secara luas, sehingga penerapannya tidak konsisten.

b. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan yang dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah. Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah *besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.*

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2024 sampai Triwulan IV sebanyak 2,27 % dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	3.536	3.349	3.349	5.313	5.216	6.046
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	174.643	187.543	185.816	219.154	230.123	220.519
3	Persentase	2,02	1,79	1,80	2,42	2,27	2,74

Sumber : DPPAPPKB 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Temanggung diperoleh data dari :

- Jumlah ASN yang ada di data BKPSDM : 5214
- Jumlah perempuan yang bekerja di BLUD : 269
- Jumlah perempuan yang bekerja sebagai perangkat desa, data dari DIPERMADES : 563 adapun jumlah perempuan dalam lembaga pemerintah per SKPD, BLUD dan Pemdes dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7
 Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah
 Kabupaten Temanggung tahun 2025 sampai Triwulan II

NO	NAMA OPD	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	71	40	111
2	Sekretaris DPRD	12	8	20
3	BAPPEDA	22	17	39
4	BKPSDM	21	15	36
5	DINPERMADES	9	13	22
6	Inspektorat	22	29	51
7	DPRKPLH	86	40	126
8	RSUD	126	319	445
9	DPPPAPPKB	10	16	26
10	Dinkominfo	24	12	36
11	BPBD	17	7	24
12	Dindukcapil	16	20	36
13	Dinkes	183	971	1154
14	BPPKAD	29	29	58
15	Dindikpora	1.536	3299	4835
16	Dishub	41	8	49
17	Disperindagkop UMKM	67	15	82
18	Dintan Pangan	103	115	218
19	Dinsos	13	23	36
20	Disnaker	20	23	43
21	DPU	89	21	110
23	Dinbudpar	20	11	31
24	Dinarpus	12	16	28
25	Kesbangpol	13	9	22
26	Satpol PP Damkar	52	8	60
28	DPMPTSP	6	11	17
29	Kec.Bansari	8	6	14
30	Kec.Bejen	8	5	13
31	Kec.Bulu	8	5	13
32	Kec.Candiroto	10	5	15
33	Kec.Gemawang	8	2	10
34	Kec.Jumo	10	3	13
35	Kec.Kaloran	9	6	15
36	Kec.Kandangan	9	4	13
37	Kec.Kedu	7	4	11
38	Kec.Kledung	9	4	13
39	Kec.Kranggan	14	7	21
40	Kec.Ngadirejo	19	3	22
41	Kec.Parakan	19	4	23
42	Kec.Pringsurat	8	8	16
43	Kec.Selopampang	10	3	13
44	Kec.Temanggung	63	33	96
45	Kec.Tembarak	8	4	12

NO	NAMA OPD	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
46	Kec.Tlogomulyo	10	6	16
47	Kec.Tretep	13	1	14
48	Kec.Wonoboyo	9	3	12
	Sub jumlah	2.871	5214	8085
	Blud		269	
	Pemdes		563	
	JUMLAH		6.046	

Sumber: BKPSDM, BLUD dan Pemdes Tahun 2025

Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor Pendorongnya adalah
 - Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan memperluas peluang untuk bekerja dilembaga pemerintah
2. Faktor Penghambat adalah:
 - Budaya Patriaki, yang menganggap laki laki lebih layak memimpin
 - Ketimpangan akses terhadap informasi politik dan pememerintahan bagi perempuan

c. Rasio Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsive Gender dalam Penyusunan Renja SKPD

Perencanaan Responsif Gender menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah Pasal 1, bahwa perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki. Salah satu ukuran kontribusi Perempuan dalam merencanakan proses pembangunan yaitu Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu:

1. Akses
2. Partisipasif
3. Control, dan
4. Manfaat yang setara bagi laki laki dan perempuan

Dengan mengeintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah/statistik gender dan untuk menyusun Anggaran

Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan.

Rumus perhitungan Rasio PD yang menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD adalah jumlah PD yang menerapkan ARG dibandingkan jumlah PD dikalikan 100% dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2.8
Rasio PD yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan ARG	21	38	46	46	46	46
2	Jumlah Perangkat Daerah yang ada	48	46	46	46	46	46
3	Persentase	43,75	82,61	100	100	100	100

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Perangkat Daerah yang menerapkan Anggaran responsif Gender pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 Triwulan II sejumlah 46 PD atau 100% dari target yang ada.

Rasio PD yang menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung ada beberapa faktor pendorong dan penghambat proses pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Faktor Pendorongnya adalah
 - Telah dilaksankanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Resposif Gender dalam proses perencanaan
 - Telah disyaratkan sebagai dokumen yang harus direview oleh Inspektorat dalam Pnyusunan RKA
2. Faktor Penghambatnya adalah
 - perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran
 - Implemantasi ARG sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari pimpinan Lembaga atau daerah, tanpa dukungan ini ARG , hanya menjadi formalitas,

- Beberapa Pihak menganggap ARG hanya sebagai beban adminstarsi tambahan, bukan bagian penting dari perencanaan yang berkualitas
- ARG belum mnjadi bagian yang menyatu dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan secara luas, sehingga penerapannya tidak konsisten
- Adapun Perangkat Daerah yang telah melaporkan anggaran ARG seperti pada Tabel 2.8

3. Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Rumus: Jumlah anak perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah anak perempuan yang ada kali 100%

Tabel 2.9
Pervalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak perempuan yang mengalami kekerasan dan mendapat pelayanan	24	5	3	5	6	6
2	Jumlah anak perempuan yang ada	113.700	114.319	107.733	297.635	108.656	108.553
3	Persentase	0,0211	0,0044	0,0028	0,0017	0,0055	0,0055

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 2.9 terlihat semua kasus yang melapor sudah tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persedur, dari jumlah seluruh kasus yang terjadi pada anak perempuan pada Tahun 2023 sebanyak 5 kasus atau 0,0017 dari semua jumlah anak perempuan, sedangkan pada tahun 2025 triwulan I ada 4 kasus atau 0,0037 dari jumlah anak perempuan sejumlah 108.553. dari beberapa kasus

kekerasan terhadap anak perempuan di kabupaten Temanggung, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi diantaranya adalah :

a. Faktor Pendorong adalah :

- semakin meningkatnya pemahaman orang tua dan anak tentang perlindungan anak perempuan
- Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas

b. Faktor Penghambatnya adalah :

- kurangnya pemahaman masyarakat atas hak anak dan perlindungan anak

Untuk kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan
Kabupaten Temanggung sampai Triwulan Ii Tahun 2025

Sumber: Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Jenis Kasus	KECAMATAN																				2024
		Temanggung	Tembarak	Selopampang	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandangan	Bulu	Kedu	Tlogomulyo	Parakan	Bansari	Kledung	Jumo	Gemawang	Ngadirejo	Candiroto	Bejen	Wonoboyo	Tretep	
1	KDRT																					
2	Kekerasan terhadap anak/Penganiayaan																					
3	Perkosaan																					
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma																					
5	Bullying/Perundungan																					
6	Pembuangan Anak																					
7	Penelantaran																					
8	Perzinaan																					
9	Kekerasan terhadap TKW																					
10	Kekerasan dalam Pacaran																					
11	(ABH)																					
12	Sodomi																					
13	Kekerasan seksual Anak						1		1													
14	Kekerasan Seksual (disabil)																					
15	Pelecehan Seksual								1		2				1							
16	Kekerasan fisik	2															1		1			
17	Persetubuhan Anak																					
18	Membawa Lari anak																					
19	Pencabulan																					
20	TPPO/Trafficking																					
21	Bunuh diri Anak																					
22	Penganiayaan																					
23	Perampasan																					
	Jumlah	2					1		2		2				1		1		1			

4. Persentase Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan Korban Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumus Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah perempuan yang ada kali 100%

Capaian persentase perempuan korban kekerasan sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.11
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan mendapat pelayanan	42	11	22	13	12	9
2	Jumlah perempuan yang ada	509.853	506.308	516.213	514.578	05.320	407.885
3	Persentase	0,0082	0,0022	0,0043	0,0025	0,0030	0,0022

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Adapun jenis kasus perempuan yang mengalami kekerasan di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.12 dibawah ini:

Tabel 2.11 b
Jumlah Perempuan yang Mengalami Kekerasan
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Kasus	Kasus Perempuan
1	KDRT	2
2	Kekerasan terhadap anak/Penganiayaan	1

No	Jenis Kasus	Kasus Perempuan
3	Perkosaan	
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma	
5	Bullying/Perundungan	
6	Pembuangan Anak	
7	Penelantaran	
8	Perzinaan	
9	Kekerasan terhadap TKW	
10	Kekerasan dalam Pacaran	
11	(ABH)	
12	Sodomi	
13	Kekerasan seksual Anak	6
14	Kekerasan Seksual (disabil)	
15	Pelecehan Seksual	
16	Kekerasan fisik	
17	Persetubuhan Anak	
18	Membawa Lari anak	
19	Pencabulan	
20	TPPO/Trafficking	
21	Bunuh diri Anak	
22	Penganiayaan	
23	Perampasan	
	Jumlah	

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah :

1. Faktor Pendorong adalah:

Faktor sosial budaya: sistem patriaki yang menganggap laki laki lebih kuat dari perempuan yang memicu diskriminasi dan kekerasan dan faktor ekonomi yaitu kestabilan ekonomi dapat meningkatkan stres dalam rumah tangga

2. Faktor Penghambat:

Stigma sosial yaitu korban seringkali merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan karena adanya stigma negatif dari masyarakat, minimnya akses ke pengaduan. kurangnya layanan atau fasilitas pendukung seperti rumah aman, konseling dan pendampingan hukum.

5. Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang merupakan gerakan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, dilaksanakan bersama-sama yakni antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Rumus: jumlah desa yang telah memiliki satgas gerakan sayang ibu dan bayi dibandingkan jumlah desa yang ada dikalikan 100

Capaian Desa sayang ibu dan bayi dapat dilihat pada Tabel 2.12 dibawah ini:

Tabel 1.12
Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d Tahun 2025
Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan GSIB	82	91	115	289	289	289
2	Jumlah desa/kelurahan yang ada	289	289	289	289	289	289
3	Persentase	28,37	31,49	39,79	100	100	100

Sumber: DPPPAPPKB Tahun 2025

Dari tabel diatas, jumlah Desa yang sudah mempunyai satgas GSI dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 Triwulan I sejumlah 289 Desa/ 100% dari jumlah Desa sebanyak 289.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI diantaranya adalah dengan integrasi kegiatan yang ada ditingkat desa, yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD/Forum. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini adalah:

- a. Faktor pendorongnya Peningkatan komitmen Pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan bayi dengan mensosialisasi 3T (Terlambat mengambil keputusan, sehingga terlambat untuk mendapatkan penanganan, Terlambat sampai ke fasilitas kesehatan karena kendala transportasi, Terlambat mendapat penanganan karena terbatasnya sarana dan sumber daya manusia) dan 4 terlalu (Kehamilan terlalu muda/hamil dibawah 20 tahun, Usia yang terlalu tua untuk hamil/diatas 35 tahun, Jarak kehamilan terlalu dekat/kurang dari 2 tahun, Kehamilan terlalu banyak/lebih dari 3 anak);
 - b. Faktor Penghambatnya masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan.
6. Persentase Pelayanan Ramah Anak di Rumah Sakit dan Puskesmas

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Untuk mendukung keberhasilan gerakan tersebut, juga didukung oleh pelayanan ramah anak dan perempuan di bidang perumahan, serta pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas.

Rumus persentase Rumah Sakit dan Puskesmas sayang ibu dan bayi: Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas sayang ibu dan bayi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada dikalikan 100%.

Adapun presentase Rumah Sakit dan Puskesmas sayang ibu dan bayi di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah ini:

Tabel 2.13
 Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak
 Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah RS dan Puskesmas yang menerapkan pelayanan ramah anak	N.A	N.A	N.A	16	17	17
2	Jumlah RS dan Puskesmas yang ada	N.A	N.A	N.A	30	30	30
3	Persentase				53,33	56,67	56,67

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas, Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan yang mendukung gerakan sayang ibu dan anak di Kabupaten Temanggung pencapaiannnya 56,67%, atau baru 17 yang menerapkan pelayanan ramah anak, 17 Puskesmas yang melayani dan peduli akan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka menurunkan AKB dan AKI.

Adapun Rumah Sakit dan Puskesmas ramah anak di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Tabel 2.13b dibawah ini:

Tabel 2.13b
 Puskesmas ramah anak
 Kabupaten Temanggung Tahun 2025

PUSKESMAS	KECAMATAN
Puskesmas Temanggung	Kecamatan Temanggung
Puskesmas Dharmarini	Kecamatan Temanggung
Puskesmas Ngadirejo	Kecamatan Ngadirejo
Puskesmas Parakan	Kecamatan Parakan
Puskesmas Kedu	Kecamatan Kedu
Puskesmas Candiroto	Kecamatan Candiroto
Puskesmas Kandangan	Kecamatan Kandangan
Puskesmas Bansari	Kecamatan Bansari
Puskesmas Bulu	Kecamatan Bulu
Puskesmas Kranggan	Kecamatan Kranggan

Puskesmas Pare	Kecamatan Pare
Puskesmas Bejen	Kecamatan Bejen
Puskesmas Tlogomulyo	Kecamatan Tlogomulyo
Puskesmas Kaloran	Kecamatan Kaloran
Puskesmas Rejosari	Kecamatan Pringsurat
Puskesmas Pringsurat	Kecamatan Pringsurat

7. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak menurut Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga.
2. Pengasuhan alternatif.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.
5. Perlindungan khusus.

Untuk mengukur keberhasilan KLA dapat dilihat dari kategori yang diperoleh Kabupaten terhadap evaluasi dan penilaian Kabupaten Layak Anak, dimana kategori tersebut meliputi: Madya, Nindya dan Utama.

Adapun ukuran penilaian perkategori adalah:

- Kategori Pratama, dengan nilai : 500 – 600
- Ketegori Madya, dengan nilai : 601 – 700
- Kategori Nindya, dengan nilai : 701 – 800
- Kategori Utama, dengan Nilai : 801 – 900

Adapun kondisi KLA di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 Triwulan I inikator

penilaian mandiri Tahun 2024, nilai nya diatas 810, dengan katergori NINDYA. Untuk kondisi KLA Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 2.14
Kabupaten Layak Anak Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	kategori Kabupaten Layak Anak	N.A	N.A	Madya	Madya	nindya	nindya

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Adapapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukungnya adalah adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).
2. Faktor penghambatnya adalah masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak), belum semua Kecamatan terbentuk Forum Anak.

8. Persentase Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Rumus Persentase anak korban kekerasan: jumlah kekerasan terhadap anak (usia dibawah 18) dibagi dengan jumlah seluruh anak dikalikan 100%.

Jumlah anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 sampai pada Tahun 2025 Triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
 Persentase Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung
 Tahun 2020 s/d Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah anak yang mengalami kekerasan dan mendapat pelayanan	33	6	11	8	9	10
2	jumlah anak yang ada		75.587	232.967	231.111	230.860	223.993
3	Presentase		0,0437	0,0026	0,0048	0,0035	0,0045

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tahun 2020 sampai Triwulan II Tahun 2025, persentase kasus kekerasan naik turun, .sedangka pada tahun 2025 truwulan II ada 10 kasus yang melapor atau 0,0045 dari jumlah anak sebanyak 223.993 dan jumah korban tersebut adalah anak perempuan

Adapun jumlah kekerasan terhadap anak sesuai jenis kasusnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan I seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.15b
 Jumlah Anak yang Mengalami Kekerasan
 Tahun 2025 s.d Triwulan I

No	Jenis Kasus	Kasus Anak
1	KDRT	
2	Kekerasan terhadap anak/Penganiayaan	2
3	Perkosaan	
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma	
5	Bullying/Perundungan	
6	Pembuangan Anak	
7	Penelantaran	
8	Perzinaan	
9	Kekerasan terhadap TKW	
10	Kekerasan dalam Pacaran	
11	(ABH)	
12	Sodomi	2
13	Kekerasan seksual Anak	6
14	Kekerasan Seksual (disabil)	
15	Pelecehan Seksual	

16	Kekerasan fisik	
17	Persetubuhan Anak	
18	Membawa Lari anak	
19	Pencabulan	
20	TPPO/Trafficking	
21	Bunuh diri Anak	
22	Penganiayaan	
23	Perampasan	
	Jumlah	10

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Adapun faktor pendorong dan penghambatnya dalam penanganan kasus terhadap anak adalah :

a. Faktor Pendorong adalah :

- Adanya regulasi dan kebijakan nasional yang mengatur perlindungan terhadap anak.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak
- Adanya layanan pengaduan kekerasan terhadap anak, lewat Aplikasi SIPESAN PERAK
- Keterlibatan berbagai sektor: hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama dalam menangani kasus anak.

b. Faktor Penghambat adalah :

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak hak anak
- Minimnya pelaporan karena Anak

9. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 Tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Rumus: jumlah penduduk tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikalikan selisih jumlah penduduk tahun P_t dengan P_o

$$r = \{(P_t/P_o) \times (1/t) - 1\} \times 100$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun P_t dengan P_o

r = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 0,54 % seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.16
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk	791.264	791.264	799.764	799.764	799.764	799.764
2	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,98	0,71	0,69	0.86	0,80	0,77

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, pada Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan I laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung masih menggunakan angka yang sama sesuai data yang dipublikasikan oleh BPS sebesar 0,80 turun dari tahun 2023, sebesar 0,06 namun masih kurang dari target yang ditentukan sebesar 0,60 .

Adapun kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Faktor Pendorong adalah: Meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang Pengendalian penduduk;
2. Faktor Penghambat adalah: Masih tingginya angka kelahiran (CBR).

10. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri-ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali.

Rumus perhitungan persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan adalah jumlah Dokumen data mikro keluarga yang ada dan yang disajikan dibagi dengan jumlah desa yang ada x 100%.

Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s.d 2024 Triwulan III dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2021	2023	2024	2025
1	Jumlah dokumen Keluarga yang yang disajikan	289	289	289	289	289	289
2	Jumlah Desa	289	289	289	289	289	289
3	Presentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Data mikro keluarga merupakan data berkembang yang dilaporkan setiap tahun oleh masing masing Kecamatan yang diolah untuk mengetahui perkembangan KK, KB dan KS di Kabupaten Temanggung. Dari hasil laporan Kecamatan pada Tahun 2019 s.d 2024 Triwulan IV,

jumlah Desa tidak mengalami tambahan, adapun data yang kita gunakan sekarang masih menggunakan data yang masih berjalan.

Dalam penyajian data mikro program Bangga Kencana di Kabupaten Temanggung, berdasarkan laporan Pendataan Keluarga 2021, yang diupdate setiap tahun. Namun demikian penyajian data ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Faktor Pendorong adalah:

Adanya kegiatan Pendataan dan Up dating data keluarga;

2. Faktor Penghambat adalah: Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT.

11. Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi/Unmetneed

Unmetneed merupakan jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (Tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). *Rumus presentase Unmetneed : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS) dibagi pasangan usia subur x 100%.* Adapun data Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 Triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 2.18 dibawah ini :

Tabel 2.18
 Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB
 tidak terpenuhi (Unmetneed)
 Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PUS Unmetneed	17.948	17.012	15.084	11.059	9.493	9.129
2	Jumlah PUS	130.415	130.996	131.516	128.266	124.978	123.076
3	Presentase	13,76	12,99	11,47	8,62	7,60	7,42

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Semakin kecil jumlah persentase unmetneed maka nilainya semakin baik. Selama periode Tahun 2020 s/d Tahun 2025 Triwulan II, unmetneed angka di Kabupaten Temanggung semakin menurun, dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan baik dari tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Adapun data PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmetneed) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (Unmetneed)
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

NO	KECAMATAN	INGIN ANAK DITUNDA (IAT)	TIDAK INGIN ANAK LAGI (TIAL)	JUMLAH	JUMLAH PUS	%
1	2	3	4	5=klm 3+4	6	7= klm 5/6
1	B U L U	282	185	467	7.958	5,87
2	TEMBARAK	191	198	389	4.762	8,17
3	TEMANGGUNG	452	395	847	10.198	8,31
4	PRINGSURAT	317	322	639	8.688	7,35
5	KALORAN	227	309	536	6.945	7,72
6	KANDANGAN	291	225	516	8.571	6,02
7	K E D U	469	333	802	9.147	8,77
8	PARAKAN	375	433	808	7.198	11,23
9	NGADIREJO	392	338	730	8.952	8,15
10	J U M O	126	163	289	4.725	6,12
11	TRETEP	145	213	358	4.181	8,56
12	CANDIROTO	150	231	381	5.321	7,16
13	KRANGGAN	312	209	521	8.099	6,43
14	TLOGOMULYO	118	157	275	4.010	6,86
15	SELOPAMPANG	161	72	233	3.387	6,88
16	BANSARI	171	91	262	4.000	6,55
17	KLEDUNG	168	180	348	4.867	7,15
18	B E J E N	130	122	252	3.290	7,66
19	WONOBOYO	117	252	369	4.386	8,41
20	GEMAWANG	233	238	471	6.293	7,48
	JUMLAH	4.827	4.666	9.129	123.076	7,42

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari capaian Unmet Need pada tahun 2025 sebesar 7,42 semakin menurun/semakin baik dibandingkan pada tahun 2024, hal ini karena adanya peningkatan KIE kepada masyarakat tentang perlunya berKB baik kepada PUS yang masih muda maupun kepada PUS yang merasa sudah tua. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor Pendorong adalah peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral, terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja, inya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja

- b. Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
- c. Pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga.

Faktor Penghambat adalah: Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja.

12. Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun

PUS (Pasangan Usai Subur) adalah pasangan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada perkawinan yang sah. PUS dibawah 20 tahun adalah pasangan usia subur yang menikah dengan sah dengan istri berumur kurang dari 20 tahun (UU no 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8).

Rumus dari PUS Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th adalah Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th<dibagi jumlah PUS secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 2.20
PUS < 20 TH
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PUS < 20 TH	2.038	1.332	1.322	1.311	460	409
2	Jumlah PUS	130.145	130.966	130.068	128.622	124.978	123.076
3	Persentase	1,57	1,02	1,02	1,02	0,37	0,33

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PUS dibawah 20 tahun pada 2023 sampai tahun 2024 triwulan IV mengalami penurunan, dibuktikan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.21
PUS dibawah 20 Tahun
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PUS UMUR 15-19 TH	%
1	2	3	4	5
1	B U L U	7.958	43	0,64
2	TEMBARAK	4.762	6	0,13
3	TEMANGGUNG	10.198	23	0,27
4	PRINGSURAT	8.688	22	0,31
5	KALORAN	6.945	9	0,13
6	KANDANGAN	8.571	35	0,58

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PUS UMUR 15-19 TH	%
7	K E D U	9.147	27	0,33
8	PARAKAN	7.198	20	0,28
9	NGADIREJO	8.952	23	0,29
10	J U M O	4.725	10	0,21
11	TRETEP	4.181	20	0,53
12	CANDIROTO	5.321	25	0,56
13	KRANGGAN	8.099	20	0,25
14	TLOGOMULYO	4.010	14	0,35
15	SELOPAMPANG	3.387	13	0,38
16	BANSARI	4.000	22	0,55
17	KLEDUNG	4.867	10	0,21
18	B E J E N	3.290	10	0,30
19	WONOBOYO	4.386	36	0,91
20	GEMAWANG	6.293	22	0,35
	TOTAL	123.076	409	0,33

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

13. Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15–19 Tahun)

ASFR (Age Specifik Fertility Rates) adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur tertentu. Sedangkan ASFR 15–19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15–19 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok umurnya.

Rumus dari pada ASFR 15-19 tahun adalah:

$$\text{ASFR 15-19th} = (\text{B 15-19 TH}) / (\text{Pf 15-19 th}) \times 1000$$

B 15 – 19 TH : Jumlah kelahiran didalam kelompok umur 15 – 19 tahun Selama 1 tahun
Pf 15 – 19 th : Jumlah perempuan kelompok umur 15- 19 tahun pada Pertengahan tahun yang sama

Untuk perhitungan ASFR di Kabupaten

Temanggung yang bersumber di Dinas PPKBPPPA dihitung berdasar hasil pendataan yang dilakukan 5 tahun sekali dan dari perkembangan laporan selama 1 tahun dari penyuluh KB di Kecamatan dapat dilihat ada Tabel 22 dibawah ini:

Tabel 2.22
 Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
 Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kelahiran oleh kelompok umur 15 – 19 th	N.A	616	276	177	316	284
2	Jumlah wanita usia 15 – 19 th	N.A	28.899	28.166	26.553	22.414	31.098
3	Persentase		21,32	9,80	6,67	14,10	9,13

Sumber data : DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa ASFR 15–19 TH di Kabupaten Temanggung perlu juga penanganan lebih lanjut, hal ini bisa dilihat dari presentase pernikahan dini yang masih tinggi dan di Dinas PPPAPPKB selalu berupaya menurunkannya dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/Sekolah Siaga Kependudukan dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja), Sosialisasi jo kawin bocah. Namun, dilihat dari pencapaian variabel PUS dibawah usia 20 th angkanya semakin menurun, hal ini menunjukkan hasil dari peningkatan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.

Adapun kelahiran oleh wanita usia subur antara 15–19 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23
ASFR 15–19 Tahun
Data Kelahiran Oleh Wanita Usia 15–19th
Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

No	Puskesmas	DATA DASAR	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA	
		15-18 thn	REMAJA YANG HAMIL	JUMLAH REMAJA YANG MELAHIRKAN
1	Parakan	2.230	24	20
2	Kledung	809	23	18
3	Bansari	884	10	5
4	Bulu	2.027	21	20
5	Temanggung	3.729	16	12
6	Tlogomulyo	917	25	23
7	Tembarak	1.174	11	6
8	Selopampang	743	15	11
9	Kranggan	2.052	5	4
10	Pringsurat	1.911	10	9
11	Kaloran	1.725	15	13
12	Kandangan	2.103	15	3
13	Kedu	2.461	6	5
14	Ngadirejo	2.202	24	31
15	Jumo	1.209	8	5
16	Gemawang	1.461	10	8
17	Candiroto	1.096	7	4
18	Bejen	701	9	9
19	Tretep	662	9	5
20	Wonoboyo	1.002	21	18
Jumlah		31.098	284	229

Sumber data : DPPPAPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Dinas Kesehatan

14. Persentase PUS yang Mempunyai Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Semua Jenis Kontrasepsi Modern

PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi moderen adalah PUS yang tahu tentang semua alat kontrasepsi dari proses pemasangan, jangka waktu penggunaan, efektifitas penggunaan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut.

Rumus persentase adalah: jumlah seluruh PUS yang tahu dan paham tentang alat kontrasepsi moderen dibandingkan seluruh jumlah PUS dikalikan 100 %.

Tabel 2.24
 PUS yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Semua
 Jenis Kontrasepsi Moderen
 Tahun 2020 s/d Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	107.739	98.622	100.714	103082	112.924	111.313
2	Jumlah PUS	130.415	130.966	131.516	128622	124.978	123.076
3	Persentase	82,61	75,30	76,58	80,14	90,36	90,44

Sumber data : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan PUS tentang alokon modern cenderung naik diandingkan pada tahun 2024. Setiap PUS mau menggunakan alat kontrasepsi karena tahu tentang jenis, jangka waktu dan efek sampaiing alokon yang akan digunakan, adapun pencapain perkecamatan adalah:

Tabel 2.25
 Jumlah PUS Yang Memiliki Pengetahuan Kontrasepsi Modern
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Triwulan II

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PA	PUS YANG MEMAHAMI KONTRASEPSI MODERN
1	BULU	7.958	8530	6765
2	TEMBARAK	4.762	3316	3909
3	TEMANGGUNG	10.198	6445	8039
4	PRINGSURAT	8.688	3912	7045
5	KALORAN	6.945	2592	5835
6	KANDANGAN	8.571	6809	7272
7	KEDU	9.147	6008	7379
8	PARAKAN	7.198	5484	5735
9	NGADIREJO	8.952	3371	7221
10	JUMO	4.725	3879	4125
11	TRETEP	4.181	7436	3501
12	CANDIROTO	5.321	6511	4352
13	KRANGGAN	8.099	6902	6682
14	TLOGOMULYO	4.010	4285	3384
15	SELOPAMPANG	3.387	2839	2765
16	BANSARI	4.000	4093	3464
16	KLEDUNG	4.867	5043	3927

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PA	PUS YANG MEMAHAMI KONTRASEPSI MODERN
18	BEJEN	3.290	3483	2882
19	WONOBOYO	4.386	3616	3674
20	GEMAWANG	6.293	6820	5126
	TOTAL	124.978	111.313	90,44

Sumber data: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

15. Persentase Kepesertaan KB Aktif/Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP.

Rumus: Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100.

Adapun Tabel peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 sampai dengan 2025 triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.26
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Peserta KB Aktif	107.739	98.622	100.714	103.082	102.297	101.194
2	Jumlah PUS	130.415	130.966	131.516	128.622	124.978	123.076
3	Persentase	82,61	75,30	76,58	80.14	81,85	82,22

Sumber data: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pemuakhiran data setiap bulan dari laporan lini lapangan oleh kader dan Penyuluh KB di Kecamatan melalui aplikasi Simantap Kon KB kondisinya semakin naik. Hasil laporan Simantap kon KB sampai kondisi triwulan II Tahun 2025 peserta KB di Kabupaten Temanggung sejumlah 101.194 atau 82,22% dari

jumlah PUS 123.076, hal ini disebabkan faktor meningkatnya jumlah yang DO PUS (karena umur 49 ketas sudah tidak masuk kategori PUS) yang berakibat juga menurunnya jumlah peserta KB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27
Persentase Kepesertaan KB Aktif/Angka Pemakaian Kontrasepsi/
CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan II

NO	KECAMATAN	PUS	TOTAL PA	%
1	B U L U	7958	6672	83,84
2	TEMBARAK	4762	3855	80,95
3	TEMANGGUNG	10198	8021	78,65
4	PRINGSURAT	8688	6966	80,18
5	KALORAN	6945	5692	81,96
6	KANDANGAN	8571	7129	83,18
7	K E D U	9147	7444	81,38
8	PARAKAN	7198	5540	76,97
9	NGADIREJO	8952	7358	82,19
10	J U M O	4725	4029	85,27
11	TRETEP	4181	3494	83,57
12	CANDIROTO	5321	4426	83,18
13	KRANGGAN	8099	6589	81,36
14	TLOGOMULYO	4010	3383	84,36
15	SELOPAMPANG	3387	2784	82,20
16	BANSARI	4000	3302	82,55
17	KLEDUNG	4867	3986	81,90
18	B E J E N	3290	2762	83,95
19	WONOBOYO	4386	3638	82,95
20	GEMAWANG	6293	5227	83,06
		123.076	101.194	82,22

Sumber data: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari capai Peserta KB aktif sebesar 82,22, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- 1. Faktor Pendorong adalah :
 - a. Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB
 - b. Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stake holder
 - c. Mobilias media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasespsi

2. Faktor Penghambat adalah :

- a. Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern
- b. PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon

16. Persentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW).

Rumus: Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang, Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Jumlah Peserta KB MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Peserta KB MKJP	107.739	98.622	100.714	47.176	47.514	47.927
2	Jumlah (PUS) yang berKB	130.415	130.966	131.516	103.082	102.297	101.194
3	Persentase	82,61	75,30	76,58	45,77	46,45	47,36

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2020–2025 triwulan II, namun dubandingkan dengan target di tahun 2025 , sudah tercapai 100 %, hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi. Seiring dengan hasil kegiatan updatting Pendataan Tahun 2023/PK23. Pencapaian peserta KB Kabupaten

Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024 sampai TW IV, capaian peserta KB berdasar hasil laporan SIMANTAP KON KB tercapai 47. 514 atau 47,45% dari peserta KB sebanyak 102.297. Adapun Permasalahan turunnya MKJP adalah:

1. Masih tingginya Rhumor kegagalan IUD di masyarakat
2. Dukungan anggaran pencabutan Implan rendah berakibat peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB lagi, menjadi PUS DO
3. Masih rendahnya animo masyarakat dalam pelayanan KB MOW dan MOP.
4. Peserta KB MKJP MOW dan MOP sudah banyak yang DO.
5. Meningkatnya kemandirian menggunakan alat kontrasepsi suntik

Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Temanggung per Kecamatan Tahun 2023 s.d 2024 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.29
Jumlah Pus yang Menggunakan Alokon MKJP

NO	KECAMATAN	TOTAL PA	CAPAIAN PA MKJP	%	
1	B U L U	6672	2.891	43,33	
2	TEMBARAK	3855	1.468	38,08	
3	TEMANGGUNG	8021	3.726	46,45	
4	PRINGSURAT	6966	3.554	51,02	
5	KALORAN	5692	3.099	54,44	
6	KANDANGAN	7129	3.704	51,96	
7	K E D U	7444	3.238	43,50	
8	PARAKAN	5540	2.610	47,11	
9	NGADIREJO	7358	2.996	40,72	
10	J U M O	4029	2.058	51,08	
11	TRETEP	3494	941	26,93	
12	CANDIROTO	4426	1.888	42,66	
13	KRANGGAN	6589	4.118	62,50	
14	TLOGOMULYO	3383	1.413	41,77	
15	SELOPAMPANG	2784	1.466	52,66	
16	BANSARI	3302	1.451	43,94	
17	KLEDUNG	3986	1.675	42,02	
18	B E J E N	2762	1.249	45,22	
19	WONOBOYO	3638	1.346	37,00	
20	GEMAWANG	5227	2.623	50,18	
		101.194	47.927	47,36	

17. Persentase kampung KB berkembang dan Mandiri

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau Dusun yang memiliki kriteria tertentu,dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan atau Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis .

Rumus persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh kampung KB dibagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dan Mandiri dikalikan 100 %.

Indek Desa Membangun adalah Indeks Kompusit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS) ,Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan

Indeks Ekologi (IKL) suatu Desa, IDM ini disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri .

Tujuan penyusunan IDM adalah :

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa; dan
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Indek Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan ekonomi, indeks ketahanan desa dan indeks ekologis ,yang terjabar dalam demensi sosial, demensi ekonomi dan demensi ekologi, yang mana dari demensi–demensi tersebut terdiri dari beberapa undikator, sebagai acuan menentukan kriteria suatu desa, yang berhitungannnya dari rata –rata dari IKS,IKE dan IKL)

Kriteria desa berdasarkan IKS, IKE dan IKL, terdiri dari

- A. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar bwesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
- B. Desa Maju atau yang disebut desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial , ekonomi dan ekologi, serta

kemampuan mengelolannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama ($<$ dan $=$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.

C. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mampu mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa Madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

D. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya, desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989, dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

E. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentangan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya .desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memilkinindek desa membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Dilihat dari kriteria desa diatas, dikabupaten Temanggung tersebar di 266 desa. Indek desa membangun di kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria IDM, berdasarkan data dari DipermaDes tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kategori desa Mandiri di kabupaten Temanggung ada 10 desa, menjadi 100 desa
2. Kategori desa berkembang dikabupaten Temanggung dari 195 menjadi 27
3. Kategori desa Maju dikabupaten Temanggung ada 61, menjadi 139
4. Kategori desa tertinggal di kabupaten Temanggung tidak ada, dan
5. Kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada

Yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Adapun data persentase kampung KB di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 sampai dengan 2024 Triwulan IV dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
 Persentase kampung KB
 Kabupaten Temanggung tahun 2020 s/d 2025 triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kampung Berkualitas	NA	NA	NA	67	68	280
2	Jumlah desa dengan IDM Kategori berkembang dan mandiri	NA	NA	NA	266	239	266
3	Persentase	N.A	NA	NA	25,19	28,45	105,26

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Jumlah kampung berkualitas di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2016 sampai Tahun 2024 sudah dicanangkan sebanyak 68 Desa, Namun pada tahun 2025 sampai triwulan II sebagian besar sudah dibentuk di semua desa dan kelurahan , namun kegiatannnya masih bersifat optimalisasi kegiatan yang sudah ada, diantara lain kegiatan program Bangga Kencana masih belum memaksimalkan lintas sektoral.

Adapun faktor pendorong dan penghambatnya antara lain:

- Faktor Penghambat Kampung KB
 1. Belum adanya Perbup Kampung KB
 2. Kurangnya Sosialisasi pengembangan kampung KB pada lintas sektor OPD
 3. Tidak adanya dana APBN untuk pembentukan Kampung KB
 4. Kurangnya koordinasi di lini lapangan, dari PKB, Desa, Pokja Kampung KB, linsek kec dan masyarakat
 5. Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan kampung KB
 6. Belum semua desa kampung KB mau mengembangkan Kampung KB dari setara dusun menjadi setara desa
 7. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang pengembangan kampung KB

- Faktor Pendorong dalam Kampung KB
 1. Adanya potensi kader di kampung Kb yang bisa di berdayakan
 2. Adanya dana desa yg bisa di anggarkan untuk pengembangan kampung KB
 3. Adanya dukungan dari masyarakat
 4. Adanya dukungan dari stakeholder, toma, dan toga
 5. Adanya Tim Pengembangan kampung KB kabupaten
- Rencana Tindak Lanjut Kampung KB
 1. Meningkatkan frekuensi advokasi dan KIE bagi lintas sektor atau OPD
 2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengembangan kampung KB pada Pokja Kampung KB, linsek, masyarakat.
 3. Mengadakan pelatihan bagi Pokja Kampung KB
 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan di Kampung KB
 5. Mengadakan Monev kampung KB

Desa-desa di Kabupaten Temanggung yang sudah mencanangkan Kampung KB sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31
Data Kampung KB
Kabupaten Temanggung

NO	LOKASI		PENCANANGAN	SATATUS IDM
	KECAMATAN	DESA/KEL	TANGGAL	
1	2	4	5	6
1	Bansari	Desa Mranggen Kidul	21/03/2016	Mandiri
2	Bansari	Desa Campuranom	31/07/2017	Mandiri
3	Bansari	Desa Rejosari	15/11/2018	Mandiri
4	Bejen	Desa Kemuning	17/02/2016	Maju
5	Bejen	Desa Selosabrang	25/07/2017	Mandiri
6	Bejen	Desa Lowungu	26/09/2018	Berkembang

7	Bejen	Desa Ngaliyan	02/10/2019	Berkembang
8	Bulu	Desa Wonotirto	23/02/2016	Maju
9	Bulu	Desa Wonosari	27/04/2017	Mandiri
10	Bulu	Desa Tegalrejo	29/08/2018	Mandiri
11	Candiroto	Desa Ngabeyan	29/03/2016	Maju
12	Candiroto	Desa Muntung	03/05/2017	Maju
13	Candiroto	Desa Sidoharjo	08/05/2018	Maju
14	Candiroto	Desa Batur Sari Kec. Candiroto	22/08/2019	Mandiri
15	Gemawang	Desa Gemawang	11/01/2016	Mandiri
16	Gemawang	Desa Kemiriombo	15/05/2017	Berkembang
17	Gemawang	Desa Kalibanger	11/08/2018	Maju
18	Jumo	Desa Ketitang	27/02/2016	Mandiri
19	Jumo	Desa Karangtejo	09/08/2017	Berkembang
20	Jumo	Desa Jombor	20/08/2018	Maju
21	Kaloran	Desa Gandon	24/02/2016	Maju
22	Kaloran	Desa Kemiri	27/04/2017	Maju
23	Kaloran	Desa Geblog	13/09/2018	Maju
24	Kandangan	Desa Gesing	01/03/2016	Maju
25	Kandangan	Desa Baledu	01/08/2017	Maju
26	Kandangan	Desa Ngemplak	30/10/2018	Mandiri
27	Kedu	Desa Karangtejo	29/02/2016	Maju
28	Kedu	Desa Kundisari	03/08/2017	Maju
29	Kedu	Desa Tegalsari Kec. Kedu	19/11/2018	Berkembang
30	Kedu	Desa Bandunggede	08/04/2019	Berkembang
31	Kledung	Desa Jeketro	30/03/2016	Maju
32	Kledung	Desa Kalirejo	30/08/2017	Mandiri
33	Kledung	Desa Kruwisan	16/11/2018	Mandiri
34	Kranggan	Desa Kemloko	23/01/2016	Maju
35	Kranggan	Desa Kramat	10/05/2017	Berkembang
36	Kranggan	Desa Ngropoh	14/11/2018	Maju
37	Kranggan	Desa Klepu	21/11/2018	Maju

38	Kranggan	Desa Purwosari	04/04/2019	Maju
39	Ngadirejo	Desa Gondang Winangun	28/01/2016	Mandiri
40	Ngadirejo	Desa Banjarsari	26/05/2017	Mandiri
41	Ngadirejo	Desa Mungungsari	09/11/2018	Maju
42	Parakan	Desa Traji	27/02/2016	Maju
43	Parakan	Desa Glapansari	13/07/2017	Mandiri
44	Parakan	Desa Bagusari	31/07/2018	Maju
45	Pringsurat	Desa Rejosari	24/02/2016	Mandiri
46	Pringsurat	Desa Soborejo	26/04/2017	Maju
47	Pringsurat	Desa Pagergunung	10/10/2018	Maju
48	Selopampang	Desa Bulan	17/02/2016	Maju
49	Selopampang	Desa Jetis	21/08/2017	Maju
50	Selopampang	Desa Salam Rejo	28/11/2018	Maju
51	Temanggung	Kelurahan Jampiroso	23/05/2017	
52	Temanggung	Kelurahan Walitelon Utara	28/01/2016	
53	Tembarak	Desa Tawang Sari	23/01/2016	Maju
54	Tembarak	Desa Menggoro	04/05/2017	Mandiri
55	Tembarak	Desa Purwodadi	04/10/2018	Berkembang
56	Tlogomulyo	Desa Kerokan	23/10/2017	Mandiri
57	Tlogomulyo	Desa Pagersari	10/07/2018	Maju
58	Tlogomulyo	Desa Langgeng	14/01/2016	Maju
59	Tretep	Desa Sigedong	13/01/2016	Berkembang
60	Tretep	Desa Tempelsari	27/04/2017	Berkembang
61	Tretep	Desa Bojong	29/10/2018	Berkembang
62	Wonoboyo	Desa Wonoboyo	26/01/2016	Mandiri
63	Wonoboyo	Desa Tening	18/05/2017	Maju
65	Bulu	Desa Malangsari	26/8/2019	Mandiri
66	Gemawang	jambon	2020	Maju
67	Bansari	Tlagawera	2023	Maju
68	Parakan	Nglondong	2024	Maju

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sedangkan pada Tahun 2025 triwulan II , yang sudah mencanangkan kampung Keluarga Berkualitas total semua sebanyak 280 desa dan kelurahan atau 105,65 dari jumlah desa sebanyak 266 .

18. Indek Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga tersebut, yaitu dengan Indek Pembangunan Keluarga atau I Bangga.

Adapun Indek Pembangunan Keluarga adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh I Bangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga.

Rumus Indek Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 Variabel, 3 demensi yang ditentukan mencakup :

1. Demensi Ketentraman
2. Demensi Kemandirian
3. Demensi Kebahagiaan

Setelah semua nilai – nilainya distandarisasi dengan menggunakan persamaan diatas, selanjutnya menghitung nilai komposif masing-masing demensi dengan menggunakan persamaan berikut :

$$D_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$$

Rata rata aritmatika

Langkah terakhir adalah menghitung nilai

indeks Pembangunan Keluarga dengan menggunakan rata-rata :

$$IBangga = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 D_i$$

Tabel 2.32
Indek Pembangunan Keluarga Temanggung
Tahun 2020 s.d Tahun 2025 Triwulan II

NO	URAIAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indek Pembangunan Keluarga	N.A	55,97	58,19	62,08	63,17	63,17

Sumber data: BKKBN Tahun 2025

Indek Pembangunan Keluarga Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 63,17 perhitungan ini dilakukan oleh BKKBN dengan menggunakan dasar PK24 atau pendataan Tahun 2024, yang dipublikasikan pada akhir Tahun 2024. Angka tersebut diukur berdasarkan perhitungan dari 3 dimensi yaitu :

- 1. Dimensi Ketemtraman dengan nilai 60,18
- 2. Dimensi Kemandirian 55,56 dan
- 3. Dimensi Kebahagiaaan 70.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPPPAPPKB dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB sebagaimana berikut:

- 1. Peningkatan Komitmen terhadap penyusunan anggaran responsif gender;
- 2. Peningkatan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi terhadap KB pasca persalinan; dan

4. Peningkatan komitmen lintas sektoral dalam percepatan penurunan stunting

2.4 Tingkat kinerja DPPAPPKB dari 20 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, yaitu:

Indikator Persentase keberhasilan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Hal ini disebabkan adanya faktor faktor penghambat antara lain :

1. Wilayah tertentu cenderung ke KB mandiri/non MKJP : Tretep. Wonobojo, kledung,bansari,tembarak
2. Masih adanya bidan yang mempromosikan alat kontrasepsi Suntik dibandingkan dengan MKJP
3. PUS yang menikah diusia dini belum siap untuk ber KB
4. Masih adanya PUS yang trauma menggunakan alat kontrasepsi MKJP , karena efek dari Rumor penggunaannya
5. Karena pasangannya bekerja diluar daerah sehingga tidak mau ber KB

2.5 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB antara lain :

- A Bidang Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan anak
 1. Belum Optimalnya Jejaring Lembaga Pengelola dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 2. Belum tersedianya data pilah gender sebagai dasar penyusunan anggaran responsif Gender ;
- B Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
 1. Masih rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
 2. Masih rendahnya komitmen pelaksana kegiatan pelayanan KB.

- C Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 - 1. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun;
 - 2. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA);

2.6 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- 1. Terdapat penambahan penambahan anggaran dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Temanggung, yaitu kegiatan *kampaye jo kawin bocah* dan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, yang meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.33 berikut:

Tabel 2.33
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025(

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH						1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH						
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	umlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	28	Orang	3.615.772.671	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	umlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	28	Orang	3.615.772.671	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	2.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	2.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Laporan	10 .000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Laporan	10 .000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12	Laporan	7.000.000	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12	Laporan	7.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Penggandaan yang Disediakan							Penggandaan yang Disediakan				
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12.000.000	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12.000.000	
6	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	27.949.520	6	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	27.949.520	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	6.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	6.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	32.500.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	32.500.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	6.000.000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	641.266.000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	641.266.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	15.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	unit	35.900.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	unit	35.900.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2	unit	12.000.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2	unit	12.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	dan Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	" Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 yang Dipelihara/Direh abilitasi	2	unit	5.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					30
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000
1	Advokasi dan sosialisasi penyelenggara n PUG kewenangan Kabupaten/Kot a	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	46	PD	10.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	dan Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	" Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 yang Dipelihara/Dire habilitasi	2	unit	5.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan					10.000.000	
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggara an PUG kewenangan Kabupaten/Ko ta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	46	PD	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000	
1	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40	Orang	20.000.000	1	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40	orang	20.000.000	gow
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
1	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	1	Paket kegiatan layanan rujukan kekerasan terhadap perempuan	10.000.000		Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	1	Paket kegiatan UPT	10.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	20.000.000		peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/KotaInformasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	20.000.000	dw
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/KotaDaerah Kabupaten/Kota							Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			300.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Pelayanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				300.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
	"Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota"					
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	10.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah					
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	10.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga						
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota"						
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	10.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					42.842.200		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					42.842.200	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	5	Kegiatan	35.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	5	Kegiatan	35.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Khusus Kewenangan			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	laporan	217.800.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	laporan	205.456.000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	"Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja"	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	Kegiatan	200.000.000
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kab. Temanggung, Semua	"Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan	4	Kegiatan	10.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Khusus Kewenangan				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	laporan	217.800.000	DAK Non Fisik
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	laporan	205.456.000	DAK Non Fisik
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						
	"Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja"	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	Kegiatan	200.000.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Kab. Temanggung, Semua	"Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan	4	Kegiatan	83..650.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kecamatan, Semua Kelurahan	Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya					(KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kecamatan, Semua Kelurahan	Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya				
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Lokal"	Terlaksannnya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	Kegiatan			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Lokal"	Terlaksannnya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	Kegiatan	71.825.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	laporan			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	laporan	300.000.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Luar Ruang"	Terlaksannnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	12	Laporan			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Luar Ruang"	Terlaksannnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di	12	Laporan	1.055.144.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyuluhan KKBPK		Penyuluhan KKBPK					Penyuluhan KKBPK		Balai Penyuluhan KKBPK				
	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya Pengendalian Program KKBPK	4	Kegiatan			Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksannya Pengendalian Program KKBPK	4	Kegiatan	80.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi	10	Laporan			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi	10	Laporan	821.525.000	Dak non fisik
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					1.399.956.000	DAK Fisik
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian	12	Laporan			Pengendalian Pendistribusia n Alat dan	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian	12	Laporan	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terwujudnya Peningkatan Kesertaan	12	Laporan			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Terwujudnya Peningkatan Kesertaan	12	Laporan	2.075.434.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	12	Laporan			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	12	Laporan	362.000.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	35.000.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dppppppkb kab temanggung	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2	Kegiatan			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dppppppkb kab temanggung	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2	Kegiatan	5.314.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12	Laporan			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12	Laporan	774.036.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					0		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					19.200.000	dak non fisik
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	lokus stunting kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1	Kegiatan			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	lokus stunting kabupaten Temanggung	"Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1	Kegiatan	300.000.000	Pengadaa n Sarana Kelompok Kegiatan Ketahana n dan Kesejahte raan Keluarga (BKB, BKR,

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Ekonomi Keluarga/UPPK S)							Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)						BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberd ayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
	"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	Laporan	0		"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	"Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	Laporan	3.836.700.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Kecamatan Kranggan , desa Kranggan	"Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	2	Kegiatan	35.000.000		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Kecamatan Kranggan , desa Gentan	"Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	2	Kegiatan	35.000.000	
	"Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ "Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi							"Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ "Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi						

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"							Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"						
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Laporan	0		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Laporan	50.000.000	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.7 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Desa dan bukan DPPPAPPKB. Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tab.34

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

2.8 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPPAPPKB ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 .35
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2022-2024

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SIMANTAP KON KB	PKB, Kader IMP		Pencataan dan pelaporan penyuluhan dan pelayanan KB	Pencataan dan pelaporan	Masyarakat dan PUS	DPPPAPPKB TAHUN 2021
2	SIPESAN PERAK	DPPPAPPKB, masyarakat	APBD	Sisten Pelaporan kasus oleh masyarakat	DPPPAPPB, Masyarakat	Terlapornya kasus kekerasan terhadap masyarakat dan anak	DPPPAPPKB TAHUN 2022
3	AKSI PENTING	PKB dan satgas Stunting		Pemantauan intervnsi penurunan Stunting	DPPPAPPKB, Satgas dan Masyarakat	Terpantauannya, pelaporan pemberian PMT dan TTD selama 90 HARI BERTURUT	DPPPAPPKB TAHUN 2022
4	Optimalisasi pertanggung jawaban keuangan dengan	ASN	0	Pembuatan dan form chek list SPJ	Pemakaian buku saku	SPJ	Tahun 2022

	pembuatan E-Book saku dan form cek list						
5	Anter Ceting Kamu	ASN	0	Penyuluhan terpadu pencegahan stunting dan nikah muda	Masyarakat dan remaja	Terlaksanya penyuluhan dalam rangka pencegahan stunting dan meurunnya nikah muda	Tahun 2022

2.9 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPPAPPKB ada 6 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel .2.36
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2023-2025

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Puskesmas Ramah Anak	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPPAPPKB
2	Penyuluh KB Teladan Tingkat jawa Tengah juara i	Perwakilan BKKBN jawa tengah	Propinsi Jawa tengah	DPPPAPPKB
53	Pelayanan KB dalam rangka .harii muslimat juara I tingkat propinsi ...	Perwakilan BKKBN jawa tengah	Propinsi Jawa tengah	DPPPAPPKB
4	Juara IMP teladan Juara III	Perwakilan BKKBN jawa tengah	Propinsi Jawa tengah	DPPPAPPKB
5	Terbaik II Regional Jawa Bali kategori capaian KB MKJP Tertinggi terhadap Total Pelayanan KB pada Kegiatan Pelayanan KB Serentak di Pasar Tradisional	Kemendukbangga /Kepala BKKBN	Nasional	DPPPAPPKB

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPPAPPKB lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAPPKB

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di DPPPAPPKB dalam rangka akuntabilitas kinerja DPPPAPPKB.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPPPAPPKBKab. Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
DPPPAPPKBKabupaten Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga		Indeks Ketimpangan Gender			angka	0,191	0,186
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)			angka	64,79	68,07
	Meningkatnya kesetaraan Gender	indek Pemberdayaan Gender			%	74,35	74,95
			Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	9,21	10,5
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,35	2,55
	Meningkatnya perlindungan perempuan	Rasio pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak			%	100	100
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100
				Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	angka	5,15	4,17
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	76,92	100

		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	nindya	nindya	utama
			Prosentase terbentuknya DRPPA	%	30,1	85,47
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pernikahan usia anak	%	0.092	0,059
			Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100	100
			Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,48	6,69
Meningkatnya keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			%	0,78	0,74
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7,58	7,54
	TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)		Median usia kawin pertama (Mukp)	angka	20,1	20,5
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15- 19 TH)	angka	9,22	8,7
			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,8	59,20
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46,95	47,95
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	77,8	80

			Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	15,91	18,68
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,75	46,03
			Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,4	87,8
			Indeks lansia berdaya	angka	58	58,4

Kebijakan dan strategi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025 - 2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran DPPPAPPKB Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan DPPPAPPKBTahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPPAPPKBTahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPPPAPPKB Kab. Temanggung Tahun 2026 (SUMBER SIPD PENETAPAN)

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.576.461.471		URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.576.461.471	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.576.461.471		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.576.461.471	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.615.772.671		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.615.772.671	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.788.800		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.788.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777.288.800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777.288.800	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.900.000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.900.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	10.000.000			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	10.000.000		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.000.000			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.000.000		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	42.842.200			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	42.842.200		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.000.000			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.000.000		

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	35.000.000			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	45.000.000		+ 10.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000		+ 10.000.000
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000		+ 10.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	52.842.200			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	52.842.200		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10.000.000			Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10.000.000		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.842.200		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	423.256.000			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	423.256.000		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	423.256.000			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	423.256.000		

	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	217.800.000		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	205.456.000			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	205.456.000		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.293.884.000			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.293.884.000		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.790.619.000			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.790.619.000		
	"Pengendalian Program KKBPK	80.000.000			Pengendalian Program KKBPK	80.000.000		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.055.144.000			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.055.144.000		
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.000.000			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.000.000		
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	71.825.000			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	71.825.000		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.650.000			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.650.000		
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000			Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.221.481.000			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.221.481.000		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	821.525.000			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	821.525.000		
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.399.956.000			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.399.956.000		

	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.502.434.000			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.502.434.000		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.075.434.000			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.075.434.000		
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	362.000.000			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	362.000.000		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.000.000			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.000.000		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	779.350.000			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	779.350.000		
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.314.000			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.314.000		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	774.036.000			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	774.036.000		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.245.900.000			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.245.900.000		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.205.900.000			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.205.900.000		
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.000.000			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.000.000		

	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	300.000.000			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	300.000.000		
	"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	3.836.700.000			"Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	3.836.700.000		
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	15.000.000			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	15.000.000		
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20.000.000			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	40.000.000		+20.000.000
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.000.000			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.000.000		+ 20.000.000
		16.670.185.871				16.700.185.871		

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Operasional dikarenakan Kebutuhan dalam rangka peningkatan kegiatan Generasi Berencana dan Forum Anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan usia anak dalam pencegahan stunting dan penurunan stunting di kabupaten Temanggung

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan DPPPAPPKBKab. Temanggung
Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana 2026			
						Lokasi Output Kegiatan	target capaian kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Sum- ber Dana	target kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							program	keluaran sub kegiatan	hasil kegiatan	DAU	DAK			tolak ukur	target	
					URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH					4.576.461.471	-				4.679.872.671	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.576.461.471	-				4.679.872.671	
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.615.772.671	-				3.615.772.671	
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN DPPPAPPKB sebanyak 30 orang, untuk 14 bulan	3.615.772.671		DAU	ada yang pensiun 2 orang	"Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan	14 bulan	3.615.772.671
X	XX	0 1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah					62.000.000	-					95.000.000
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tercukupi kebutuhan penerangan bangunan kantor	2.000.000		DAU		tercukupi kebutuhan penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.000.000
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya 3 Unit laptop dan 3 Unit Printer	11.000.000		DAU	belum tercukupi peralatan perlengkapan kantor, karena sudah lama tidak ada pengadaan,d an sudah banyak yang kondisi rusak	Tersedianya 3 Unit laptop dan 3 Unit Printer	100% dari usulan	20.000.000

X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tersedianya ATK ,pendukung perkantoran	7.000.000		DAU		tersedianya ATK ,pendukung perkantoran	12 bulan	12.000.000
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	tersedianya barang cetakan dan p3nggadaan ,pendukung perkantoran	7.000.000		DAU		tersedianya barang cetakan dan p3nggadaan ,pendukung perkantoran	12 bulan	12.000.000
X	XX	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tercukupi kebutuhan minum pegawai sebanyak 37 orang , fasilitas tamu	12.000.000		DAU		tercukupi kebutuhan minum pegawai sebanyak 37 orang , fasilitas tamu	12 bulan	30.000.000
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercukupi kegiatan perjalanan dinas luar daerah	30.000.000		DAU		tercukupi kegiatan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	30.000.000
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					822.788.800	-					824.100.000
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bln	7.000.000		DAU				15.000.000
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bln	32.500.000		DAU				39.100.000
X	XX	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya service alat perlengkapan kantor	6.000.000		DAU	anggaran tidak mencukupi perlengkapan kantor yang membutuhka n service	Tercukupinya service alat perlengkapan kantor	laptop, PC, dan printer	10.000.000

X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	tercukupi gaji SS, Penjaga malam balai ,satpam , tersedianya kebutuhan kebersihan kantor dan tercukupinya lembur ASN	777.288.800		DAU	Belum memenuhi standar UMR SS 12X6X20000 00	Terpenuhnya honorarium bagi SS (rincian), Satpam, Penjaga 12 Bulan	12 bulan	760.000.000
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					75..900.000	-					145.000.000
X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	tercukupi, service, BBM dan pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 2 unit	15.000.000		DAU		tercukupi, service, BBM dan pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 2 unit	12 bulan	15.000.000
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tercukupi, pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 75 unit., dan service mobil operasional	35.900.000				tercukupi, pajak kendaran dinas jabatan sebanyak 75 unit., dan service mobil operasional	12 bulan	40.000.000
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	20.000.000				tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	12 bulan	70.000.000
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	10.000.000				tercukupi pemeliharaan 2 unit gedung perkantoran	12 bulan	20.000.000

					Bangunan Lainnya		Darat Tak Bermotor									
2	0.8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					160.684.400						235.150.000
2	0.8	2	201		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					10.000.000	-					30.150.00
2	0.8	2	201	0	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000	-					30.150.000
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.)Pertemuan Teknis Penyusunan ARG , 2) advokasi APE 3) Pertemuan Pokja PUG 4) Monev APE	10.000.000		DAU	anggaran di tahun 2023 , dilaksanakan untuk mendukung kegiatan lain dan tidak mendukung capaian Target indikator PD	1.)Pertemuan Teknis Penyusunan ARG , 2) advokasi APE 3) Pertemuan Pokja PUG 4) Monev APE	4 kegiatan	30.150.000
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					42.842.200						50.000.000
2	8	3	2.01		Penyediaan layanan Lanjutan bagiPerempuan Korban Kekerasa yang Memerlukan koordinasi tigkat kabupatn					42.842.200	42842200					50.000.000

2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Paket Kegiatan layanan kasus terhadap perempuan	42.842.200		DAU	Pelayanan , Pengaduan ,penjankaua n korban dan penyediaan tempat penampunga n sementara	1 Paket Kegiatan layanan kasus terhadap perempuan	12 bulan	50.000.000
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					25.000.000						55.250.000
2	08	04	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000						25.000.000
2	08	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1) advokasi 2) Sosialisasi, 3) Pembentukan Kecamatan dan Desa GSIB dan Monev GSI	10.000.000		DAU	kegiatan dalam rangka mendukung capaian indikator Upaya keras	1) advokasi 2) Sosialisasi, 3) Pembentukan Kecamatan dan Desa GSIB	4 kegiatan	25.000.000
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					25.000.000	-					25.125.000
2	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					25.000.000	-					25.125.000

2	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Paket Kegiatan FAKTA	45.000.000		DAU		1 Paket Kegiatan FAKTA	4 kegiatan	40.000.000
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					42.842.200	400.000.000					90.000.000
2	8	7	2.01		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					42.842.200	400.000.000					50.000.000
2	8	7	2.01	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan terhadap AMPK Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pengaduan bagi AMPK	42.842.200		DAU	tahun 2023 , tidak ada anggarannnya , di tahun 2022 ada anggaran dari DAK	advokasi , sosialisasi sipesan perak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	4 kegiatan	50.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						11.158.817.000					
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						423.256.000					423.256.000
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					-	366.000.000					216.350.000
2	14	02	202	11	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pencatatan dan penguulan data keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedi	Honor PPKBD dan Faskes (Pencatatan Pelaporan)		217.800.000	DAK non Fisik		Honor PPKBD dan Faskes (Pencatatan Pelaporan)	12 bulan	217.800.000
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	Belanja Penyediaan Jasa Internet untuk Balai KB		205.456.000	DAK non Fisik		Belanja Penyediaan Jasa Internet untuk Balai KB	12 bulan	205.456.000

								Lapangan dan Pelayanan KB								
2	14	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					7.293.884.000					7.293.884.000
2	14	3	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.790.619.000					1.790.619.000
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	1) Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten dan Kecamatan 2) Mini Loka Karya Stunting 3) Rembug Stunting 4) Penunjang Pelayanan KB		200.000.000	DAK non Fisik				200.000.000
2	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Layanan KIE Keliling	10.000.000	73.650.000	DAK non Fisik dan DAU	sejak tahun 2020, kegiatan ini tidak ada anggggran , harapannnya untuk peningkatan kie kepada masyarakat sesuai kearifan lokal masyarakat, dengan memanfaatkan mobil penerangan	Layanan KIE Keliling	4 kegiata n	25.000.000

2	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Penyediaan Bahan KIE (Leaflet, Poster, Banner, Baliho, Spanduk, Media Elektronik, Sticker, Media Promosi)		71.825.000	DAK non Fisik		Penyediaan Bahan KIE (Leaflet, Poster, Banner, Baliho, Spanduk, Media Elektronik, Sticker, Media Promosi)	5 kegiatan	71.825.000
2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	rapat koordinasi program bangga kebcana dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa		300.000.000	Dak non fisik		rapat koordinasi program bangga kebcana dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa	12 bulan	300.000.000

2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Operasional Balai KB di 20 Kecamatan		1.055.144.000			Operasional Balai KB di 20 Kecamatan	12 bulan	1.055.144.000
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1) Audit Stunting		80.000.000			1) Audit Stunting	4 kegiatan	80.000.000
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) as Lapangan KB (PKB/PLKB)					-	2.221.481.000					1.399.037.250
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 kec	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Honor Sub PPKBD sebanyak 1700 orang		821.525.000	DAK non Fisik		Honor Sub PPKBD sebanyak 1627 dan PPLBD sebanyak 289 orang	4 tribulan	821.525.000

					Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	8 kecamatan	Terlaksannya Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah fasilitasi kegiatan penyuluhan dan penggerakan program Keluarga Berencana oleh Penyuluh KB	Rehab balai penyuluh KB		1.399.956.000	DAK Fisik		Rehab balai penyuluh KB	8 kegiatan	1.399.956.000
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					-	2.502.434.000					2.502.434.000
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksannya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pendistribusian Alokon di Faskes		30.000.000	DAK non Fisik		Pendistribusian Alokon di Faskes	12 bulan	30.000.000
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelayanan KB MKJP dalam moment strategis dan pelayanan rutin di faskes		2.075.434.000	DAK non Fisik		Pelayanan KB MKJP dalam moment strategis dan pelayanan rutin di faskes	12 bulan	2.075.434.000

2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	pengadaan 10 motor Op . Lini lapangan , 8 rehab dan kelengkapan balai , dan sarana pelayanan KB di 30 faskes		362.000.000	DAK Fisik		pengadaan 10 motor Op . Lini lapangan, 8 rehab dan kelengkapan balai, dan sarana pelayanan KB di 30 faskes	100%	362.000.000
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pertemuan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes Jaringan dan Jejaringnya		35.000.000			Pertemuan Koordinasi Pelayanan KB di Faskes Jaringan dan Jejaringnya	12 bulan	35.000.000
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					-	779.350.000				bulan	779.350.000
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dppppkb kab temanggung	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.314.000		9.000.000			9.000.000	12 bulan	20.000.000
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	774.036.000		1.007.500.000			1.007.500.000	12 bulan	1.139.700.000

2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					105.000.000	4.215.900.000					4.103.040.000
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					65.000.000	4.215.900.000					3.953.040.000
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Pengadaan BKB KIT untuk 25 locus stunting		300.000.000			Pengadaan BKB KIT untuk 20 locus stunting	100%	300.000.000
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Operasional Tim Pendamping Keluarga		3.836.700.000			Operasional Tim Pendamping Keluarga	12 bulan	3.533.040.000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Kecamatan Kranggan , desa Kranggan	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	sosialisasi pencegahan Stunting	35.000.000			hasil Musrenbang Kecamatan	sosialisasi pencegahan Stunting	2 kegiatan	30.000.000

					Keluarga/UPP KS)		Keluarga/ UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)								
					Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kecmatan candiroto dan tembarak	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pusat konselling dan pelayanan bangga kencana di Balai Penyuluhan		19.200.000				12 bulan	19.200.000
2	14	4	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Operasional Pemilihan Duta Genre dan Pembinaan Forgen	15.000.000				Operasional Pemilihan Duta Genre dan Pembinaan Forgen	3 kegiata n	60.000.000
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					40.000.000	-					150.000.000

2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR	40.000.000		DAU		Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR	12 bulan	150.000.000
TOTAL										5.141.368.871	11.558.817.000					
										16.700.185.871						

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun awal politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPAPPKB untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPPAPPKB Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPPAPPKB itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPPAPPKB dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPPAPPKB Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPAPPKB Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 12.054.174.367 (82,73%), realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.443.324.226 (96,65%), belanja Daerah sebesar Rp. 13.497.498.593 atau 84,03% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 4.295.498.553 (28,41%), realisasi Belanja Modal sebesar 0 {00,00%}, belanja Daerah Sebesar Rp. 4.295.498.553 (25,49%).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 DPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16.700.185.871,- yang terdiri dari 9 program antara lain program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- b. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- c. Program Perlindungan Perempuan

- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- e. Program Pemenuhan Hak Anak /PHA
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
- g. Program Pengendalian Penduduk
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran DPPPAPPKB dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS PPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG



DRA. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M
NIP. 19700730 199001 2 002